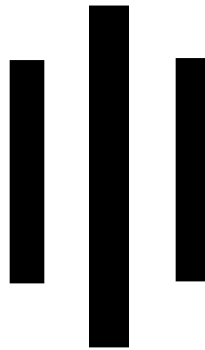




**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)**  
**TAHUN 2023**



**KOTABARU**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 disusun dalam rangka untuk memenuhi pencapaian target kinerja pada tahun yang akan datang. Rancangan Akhir Renja ini nantinya sebagai bahan acuan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung Visi Pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan salah satu dasar dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah. Untuk Visi Kepala Daerah yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang Semakin Mandiri dan Sejahtera melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisata”. Sedangkan Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yaitu “Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan”

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, namun diharapkan bermanfaat sesuai peruntukannya.

Kotabaru, Juni 2022

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru



**KHAIRIL FAJRI, S.STP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730503 199403 1 009

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat RKPD .....	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	67
 <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	75
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....	80
 <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT         DAERAH .....</b>	<b>81</b>
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>

# DAFTAR TABEL

Halaman

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 .....	12
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan .....	26
2.3	Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	52
2.4	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....	68

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan .....	77
3.2	Tujuan, Sasaran dan Strategis .....	80

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

4.1.	Rumusan dan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	88
------	--	----

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

a. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SOPD .....	2
b. Keterkaitan Renja dengan Dokumen Lainnya .....	3

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023

# **BAB I**

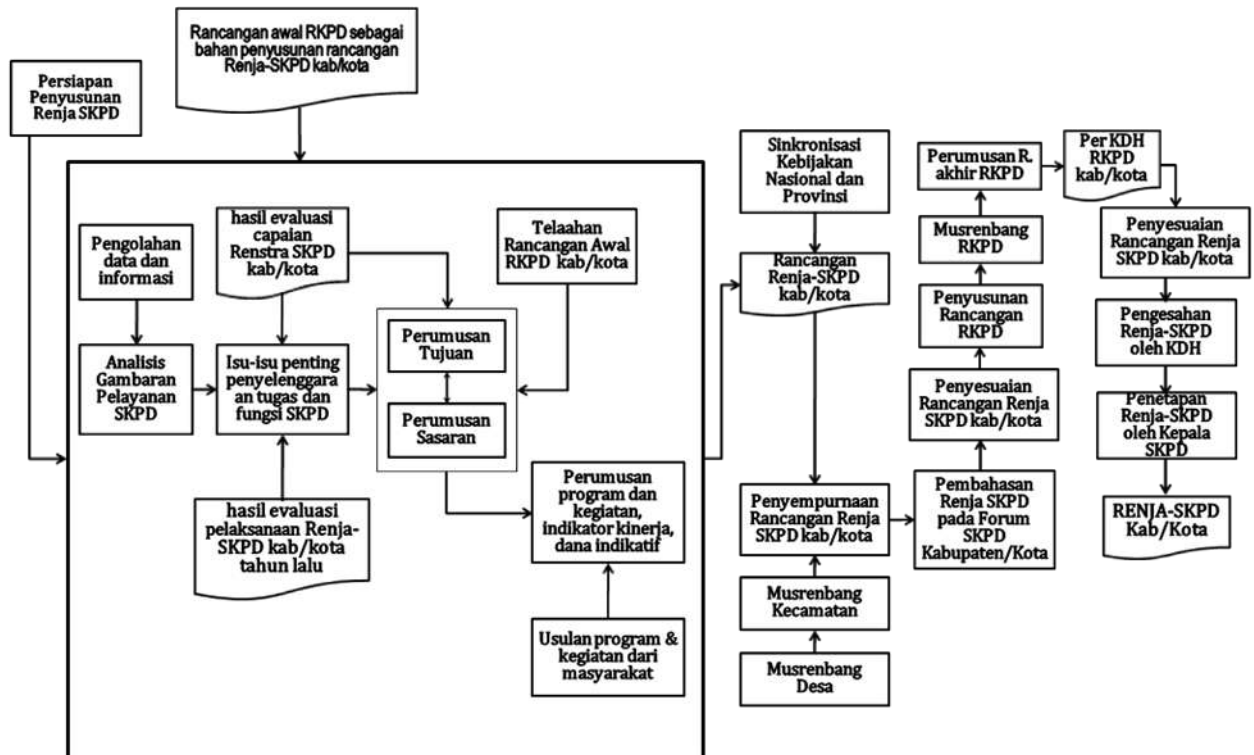
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

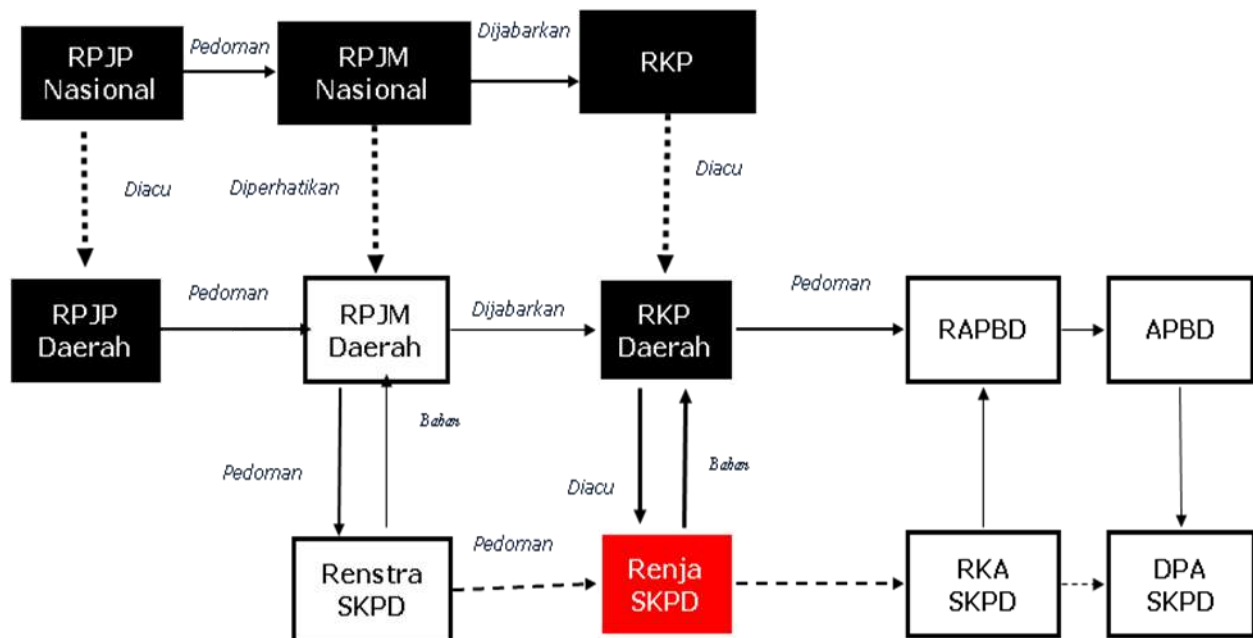
Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru. Sebagai subsistem dari perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunannya mengacu kepada Rencana Strategik (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang mana Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026 yang telah disahkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan sistem tersebut di atas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor : 8 tahun 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah, dituntut untuk mendukung pencapaian ***Visi Pemerintah Daerah yaitu : Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang Semakin Mandiri dan Sejahtera melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisataaan***”

a. Bagan alir tahapan penyusunan Renja SOPD dapat dilihat dari bagan berikut ini.



b. Keterkaitan Renja dengan dokumen lainnya dapat dilihat dari bagan berikut ini.



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 13 );
29. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 20);
30. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 138);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Merumuskan tujuan, strategis, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparat dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas – prioritas di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, sehingga program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Mempermudah pengendalian serta pelaksanaan arah pembinaan baik secara internal maupun secara eksternal.
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021, di susun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Review Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 adalah 12 (Dua Belas) program / kegiatan berhasil, telah memenuhi target kinerja (rentang capaian 91 s/d 100%) yaitu :

1. Program Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Realisasi kinerja 99,07% dan realisasi keuangan sebesar 90,96%
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan Realisasi kinerja 90,03% dan realisasi keuangan sebesar 81,00%
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,37%
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,52%
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,92%
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Realisasi kinerja 96,93% dan realisasi keuangan sebesar 95,10%
7. Program Pengembangan UMKM dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,32%
8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,64%
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,02%
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,21%
11. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Realisasi kinerja 99,61% dan realisasi keuangan sebesar 88,09%

12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Realisasi kinerja 99,69% dan realisasi keuangan sebesar 95,75%
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,41%

Sedangkan untuk program / kegiatan cukup berhasil, telah memenuhi target kinerja (rentang capaian 80 s/d 91%) yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan Realisasi kinerja 90,03% dan realisasi keuangan sebesar 81,00%. Program ini cukup berhasil karena ada kegiatan yang melibatkan pihak ketiga yang aturan tidak cukup jelas sehingga tidak dilaksanakan karena akan bermasalah.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021

Kabupaten Kotabaru

Kode Program dan Kegiatan					Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)	
1					2	3	4	5		6		7		12				13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%	
						NON URUSAN			K		K		K		K	K	Rp.	K		K	Rp.
X	XX	01			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*)			100%		100%			99,07	90,96			19,81	18,19	
															99,07	90,96			19,81	18,19	
X	XX	01	2.01		Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*)	100%		100%		100%			100,00	99,10			20,00	19,82	
X	XX	01	2.01	01	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	15	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	98,91	18	Dokumen	20,00	19,78
X	XX	01	2.01	02	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun *)	4	Dokumen					-	-	-	4	Dokumen	-	-	
X	XX	01	2.01	03	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun*)	4	Dokumen					-	-	-	4	Dokumen	-	-	
X	XX	01	2.01	04	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun*)	4	Dokumen					-	-	-	4	Dokumen	-	-	
X	XX	01	2.01	05	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun*)	4	Dokumen					-	-	-	4	Dokumen	-	-	
X	XX	01	2.01	06	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun*)	48	Dokumen					-	-	-	48	Dokumen	-	-	
X	XX	01	2.01	07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*)	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00	99,62	6	Dokumen	20,00	19,92
X	XX	01	2.02		Terlaksananya penyusunan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*)	-	100%		100%		100%		99,70	91,32			19,94	18,26	
X	XX	01	2.02	01	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan*)	130	Kali	26	Kali	26	Kali	26	Kali	100,00	92,82	156	Kali	20,00	18,56
X	XX	01	2.02	02	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terbayarkan*)	83	kali	35	Orang	35	kali	34	kali	97,14	78,53	117	kali	19,43	15,71

X	XX	01	2.02	03	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*)	48	kali					-		-	-	48		-	-
X	XX	01	2.02	04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD tersusun*)	4	Dokume n					-		-	-	4		-	-
X	XX	01	2.02	05	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*)	5	Dokume n	1	Dokume n	1	Dokum en	1	Dokum en	100,00	100,00	6	Dokume n	20,00	20,00
X	XX	01	2.02	06	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan tersusun*)	4	Dokume n					-		-	-	4	Dokume n	-	-
X	XX	01	2.02	07	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD tersusun*)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD tersusun*)	4	Dokume n					-		-	-	4	Dokume n	-	-
X	XX	01	2.02	08	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun*)	5	Dokume n	1	Dokume n	1	Dokum en	1	Dokum en	100,00	100,00	6	Dokume n	20,00	20,00
X	XX	01	2.05		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*)	1		100%	100%	100%	100%			100,00	95,47			20,00	19,09
X	XX	01	2.05	01	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.05	02	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan*)	15	Kali	3	Kali	3	Kali	3	Kali	100,00	95,47	18	Kali	20,00	19,09
X	XX	01	2.05	03	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen data Administrasi Kepegawaian tersusun*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.05	04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian berfungsi dengan baik*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.05	05	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai tersusun*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.05	06	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai Pensiun terfasilitasi*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.05	07	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang terfasilitasi*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.05	08	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pemindahan Tugas ASN yang terfasilitasi*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.05	09	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang diselenggarakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.05	10	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.05	11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Diselenggarakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.06		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*)	100	%		100%	100%	100%			100,00	98,87			20,00	19,77
X	XX	01	2.06	01	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*)	60	kali	12	Kali	12	Kali	12	Kali	100,00	100,00	72	Kali	20,00	20,00
X	XX	01	2.06	02	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*)	60	Kali	12	Kali	12	Kali	12	Kali	100,00	91,93	72	Kali	20,00	18,39

X	XX	01	2,06	03	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*)	48	kali					-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2,06	04	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan*)	60	Kali	12	Kali	12	Kali	12	Kali	100,00	98,85	72	Kali	20,00	19,77
X	XX	01	2,06	05	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*)	60	Kali	12	Kali	12	Kali	12	Kali	100,00	99,85	72	Kali	20,00	19,97
X	XX	01	2,06	06	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*)	60	Kali	12	Kali	12	Kali	12	Kali	100,00	94,40	72	Kali	20,00	18,88
X	XX	01	2,06	07	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material yang disediakan*)	12	kali					-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2,06	08	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan*)	70	Kali	14	Kali	14	Kali	14	Kali	100,00	99,70	84	Kali	20,00	19,94
X	XX	01	2,06	09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan*)	75	Kali	75	Kali	75	Kali	75	Kali	100,00	99,52	450	Kali	20,00	19,90
X	XX	01	2,06	10	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola*)	4	kali					-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2,06	11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan*)	4	kai					-		-	-	-		-	-
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*)</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>100,00</b>	<b>97,88</b>			<b>20,00</b>	<b>19,58</b>
X	XX	01	2,07	01	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2,07	02	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2,07	03	Terlaksananya Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar yang diadakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2,07	04	Terlaksananya Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2,07	05	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2,07	06	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan*)	14	Buah	6	Buah	6	Buah	6	Buah	100,00	97,88	20	Buah	20,00	19,58
X	XX	01	2,07	07	Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang diadakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2,07	08	Terlaksananya Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud yang diadakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2,07	09	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2,07	10	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*)	-						-		-	-	-		-	-

X	XX	01	2.07	11	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*)	-						-		-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*)	-	100%		100%		100%			92,51	71,82			18,50	14,36
X	XX	01	2.08	01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia*)	7.500	Lembar	1500	Lembar	1500	Lembar	1.500	Lembar	100,00	100,00	9.000	Lembar	20,00	20,00
X	XX	01	2.08	02	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*)	60	Langgan an	4	Langgan an	12	Langga nan	11	Langga nan	91,67	68,79	31	Langgan an	18,33	13,76
X	XX	01	2.08	03	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*)	8	kali					-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.08	04	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*)	264	Kali	24	Kali	24	Kali	24	Kali	100,00	98,36	288	Kali	20,00	19,67
X	XX	01	2.09		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *)	-	100%		100%		100%			87,13	71,05			17,43	14,21
X	XX	01	2.09	01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*)	48	Unit					-		-	-	48	Unit	-	-
X	XX	01	2.09	02	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan*)	33	Unit	17	Unit	17	Unit	16	Unit	94,12	80,96	49	Unit	18,82	16,19
X	XX	01	2.09	03	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Pemeliharaan Alat Besar yang disediakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.09	04	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.09	05	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang disediakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.09	06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*)	185	Kali	35	Kali	35	Kali	35	Kali	100,00	100,00	215	Kali	20,00	20,00
X	XX	01	2.09	07	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang disediakan*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.09	08	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud terpelihara*)	-						-		-	-	-		-	-
X	XX	01	2.09	09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan*)	8	Unit					-		-	-	8	Unit	-	-
X	XX	01	2.09	10	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*)	4	Unit					-		-	-	4	Unit	-	-

X	XX	01	2.09	11	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*)	32	Unit	10	Unit	10	Unit	7	Unit	70,00	42,18	48	Unit	14,00	8,44
X	XX	01	2.09	12	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi tanah yang disediakan*)	-						-		-	-	-		-	-
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										97,26	94,47			19,45	18,89
2	17	02			Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas Koperasi yang memiliki Perizinan Usaha		100,00%		0,00%					-	-			-	-
2	17	02	2.01		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100,00%		0,00%					-	-			-	-
2	17	02	2.01	01	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	kali					-		-	-	20	kali	-	-
2	17	02	2.02		Meningkatnya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		100,00%		0,00%					-	-			-	-
2	17	02	2.02	01	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	kali					-		-	-	12	kali	-	-
2	17	03			Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT		48,00%		28,57%		28,57%			90,03	81,00			18,01	16,20
2	17	03	2.01		Meningkatnya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		48,00%		28,57%		28,57%			90,03	81,00			18,01	16,20
2	17	03	2.01	01	Meningkatnya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15	kali	3	Kali	3	Kali	3	Kali	100,00	95,03	46		20,00	19,01
2	17	03	2.01	02	Meningkatnya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	kali	6	Kali	6	Kali	5	Kali	75,00	59,86	51		15,00	11,97
2	17	04			Meningkatnya Kualitas KSP/USP Koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		100,00%		20,00%		20,00%			100,00	98,37			20,00	19,67

2	17	04	2.01		Meningkatnya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100,00%		20,00%		20,00%			100,00	98,37			20,00	19,67
2	17	04	2.01	01	Meningkatnya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00	98,37	60	Dokumen	20,00	19,67
2	17	04	2.01	02	Meningkatnya Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Dokumen					-		-	-	40	Dokumen	-	-
2	17	05			Meningkatnya koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian		47,62%		47,62%		47,62%			100,00	96,52			20,00	19,30
2	17	05	2.01		Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian		47,62%		47,62%		47,62%			100,00	98,45			20,00	19,69
2	17	05	2.01	01	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	10	kali	2	Kali	2	Kali	2,00	Kali	100,00	98,45	12		20,00	19,69
2	17	05	2.01		Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan Dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Pendidikan Dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah KABUPATEN/KOTA		100,00%				20,00%			100,00	93,69			20,00	18,74
2	17	05	2.01	02	Meningkatnya peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	10	Kali			2	Kali	2	kali	100,00	93,69	10	kali	20,00	18,74
2	17	06			Meningkatnya koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		57,14%		57,14%		57,14%			100,00	99,92			20,00	19,98
2	17	06	2.01		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah		57,14%		57,14%		57,14%			100,00	99,92			20,00	19,98
2	17	06	2.01	01	Meningkatnya Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10	kali	2	Kali	2	Kali	2,00	Kali	100,00	99,92	12	Kali	20,00	19,98
2	17	07			Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil		100,00%		20,00%		20,00%			96,93	95,10			19,39	19,02

2	17	07	2.01		Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		100,00%		20,00%		20,00%			96,93	95,10			19,39	19,02
2	17	07	2.01	01	Meningkatnya Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	767	kelompok	127	Kelompok/ UMK	127	Kelompok/ UMK	108	Kelompok/ UMK	96,85	95,04	875	Kelompok/ UMK	19,37	19,01
2	17	07	2.01	02	Meningkatnya Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	40	UMK					-				40		-	-
2	17	07	2.01	03	Meningkatnya Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	270	UMK	30	UMK	30	UMK	30	UMK	100,00	100,00	300	UMK	20,00	20,00
2	17	07	2.01	04	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	270	UMK	30	UMK	30	UMK	29	UMK	96,67	92,04	299	UMK	19,33	18,41
2	17	07	2.01	05	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	120	UMK					-		-	-	120		-	-
2	17	08			Meningkatnya Usaha Mikro yang mendapatkan pembinaan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan		100,00%		20,00%		20,00%			100,00	95,32			20,00	19,06
2	17	08	2.01		Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha		100,00%		20,00%		20,00%			100,00	95,32			20,00	19,06
2	17	08	2.01	01	Meningkatnya Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	525	kali	15	Kali	15	Kali	15	kali	100,00	95,32	540	kali	20,00	19,06
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										100,00	97,83			20,00	19,57
3	30	02			Meningkatnya perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				77,78%		77,78%			100,00	92,64			20,00	18,53
3	30	02	2.01		Meningkatnya pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Rekomendasi pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan									-	-			-	-
3	30	02	2.01	01	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	32	kali					-		-	-	32		-	-
3	30	02	2.02		Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang									-	-			-	-
3	30	02	2.02	01	Meningkatnya Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	32	kali					-		-	-	32		-	-

3	30	02	2.03		Meningkatnya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri									-	-			-	-
3	30	02	2.03	01	Meningkatnya Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	32	kali					-		-	-	32		-	-
3	30	02	2.03	02	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	20	kali					-		-	-	20		-	-
3	30	02	2.04		Meningkatnya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri							-		-				-	-
3	30	02	2.04	01	Meningkatnya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	32	kali					-		-	-	32		-	-
3	30	02	2.04	02	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah rekomendasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	32	kali					-		-	-	32		-	-
3	30	02	2.05		Meningkatnya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat							-		-				-	-
3	30	02	2.05	01	Meningkatnya Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	32	kali					-		-	-	32		-	-
3	30	02	2.06		Meningkatnya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							-		-				-	-
3	30	02	2.06	01	Meningkatnya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	32	kali					-		-	-	32		-	-
3	30	02	2.06	02	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	32	kali					-		-	-	32		-	-
3	30	02	2.06	03	Meningkatnya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	32	kali					-		-	-	32		-	-

3	30	02	2.07		Meningkatnya Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			77,78%		77,78%			100,00	92,64			20,00	18,53	
3	30	02	2.07	01	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	40	kali	8	Kali	8	Kali	8	kali	100,00	92,64	48	kali	20,00	18,53
3	30	03			Meningkatnya pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan			38,46%		38,46%			100,00	99,02			20,00	19,80	
3	30	03	2.01		Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			16,92%		16,92%			100,00	99,00			20,00	19,80	
3	30	03	2.01	01	Meningkatnya Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	26	paket	10	Paket	12	Paket	12	Paket	100,00	98,99	38	Paket	20,00	19,80
3	30	03	2.01	02	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitas Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	240	kali	48	Kali	48	Kali	48	Kali	100,00	99,70	288	Kali	20,00	19,94
3	30	03	2.02		Meningkatnya Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			23,08%		23,08%			100,00	99,79			20,00	19,96	
3	30	03	2.02	01	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	250	kali	50	Kali	50	Kali	50	Kali	100,00	99,79	300	Kali	20,00	19,96
3	30	03	2.02	02	Meningkatnya Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	120	kali					-	-	-	-	120	-	-	
3	30	04			Meningkatnya stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok			100,00%		100,00 %			100,00	87,21			20,00	17,44	
3	30	04	2.01		Meningkatnya Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								-	-			-	-	
3	30	04	2.01	01	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48	kali					-	-	-	48		-	-	
3	30	04	2.01	02	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48	kali					-	-	-	48		-	-	
3	30	04	2.01	03	Meningkatnya Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	96	kali					-	-	-	96		-	-	
3	30	04	2.02		Meningkatnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			100,00%					100,00	87,21			20,00	17,44	

3	30	04	2.02	01	Meningkatnya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	384	kali					-		-	-	384		-	-
3	30	04	2.02	02	Meningkatnya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	480	kali	96	Kali	96	Kali	96	Kali	100,00	87,21	576		20,00	17,44
3	30	04	2.02	03	Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	16	kali					-		-	-	16		-	-
3	30	04	2.03		Meningkatnya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-		-	-			-	-
3	30	04	2.03	01	Meningkatnya Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	24	kali					-		-	-	24		-	-
3	30	04	2.03	02	Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24	kali					-		-	-	24		-	-
3	30	04	2.03	03	Meningkatnya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24	kali					-		-	-	24		-	-
3	30	05			Meningkatnya Pengembangan Ekspor Unggulan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan									-	-			-	-
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							-		-	-			-	-
3	30	05	2.01	01	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	192	kali					-		-	-	192		-	-
3	30	05	2.01	02	Meningkatnya Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional	8	kali					-		-	-	8		-	-
3	30	05	2.01	03	Meningkatnya Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal	8	kali					-		-	-	8		-	-
3	30	05	2.01	04	Meningkatnya Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	160	kali					-		-	-	160		-	-
3	30	05	2.01	05	Meningkatnya Peningkatan Citra Produk Ekspor	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Peningkatan Citra Produk Ekspor	160	kali					-		-	-	160		-	-
3	30	05	2.01	06	Meningkatnya Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	160	kali					-		-	-	160		-	-
3	30	06			Meningkatnya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar		100%		20%		20%			99,61	88,09			19,92	17,62
3	30	06	2.01		Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		100%		20%		20%			99,61	88,09			19,92	17,62
3	30	06	2.01	01	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	5	paket	1	Paket	1	Paket	1,00	Paket	100,00	86,64	6	Paket	20,00	17,33

3	30	06	2.01	02	Meningkatnya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	60	kali	12	Kali	12	Kali	12	Kali	100,00	100,00	72	Kali	20,00	20,00
3	30	06	2.01	03	Meningkatnya Penyidikan Metrologi Legal	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Penyidikan Metrologi Legal	5000	Buah	1000	Buah	1000	Buah	987	Buah	98,70	77,80	5.987	Buah	19,74	15,56
3	30	07			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri									-	-			-	-
3	30	07	2.01		Meningkatnya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									-	-			-	-
3	30	07	2.01	01	Meningkatnya Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						-			-	-	-		-	-
3	30	07	2.01	02	Meningkatnya Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						-			-	-	-		-	-
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan						-			-	-	-		-	-
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										99,70	95,48			19,94	19,10
3	31	02			Meningkatnya Pertumbuhan IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM		100%		20%		20%			99,69	95,75			19,94	19,15
3	31	02	2.01		Meningkatnya hasil penerapan RPIK yang ditetapkan menjadi perda	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase hasil penerapan RPIK yang ditetapkan menjadi perda		100%		20%		20%			99,69	95,75			19,94	19,15
3	31	02	2.01	01	Meningkatnya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	9	kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	80,00	63,72	10	Kali	16,00	12,74
3	31	02	2.01	02	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4	kali					-		-	-	4	kali	-	-
3	31	02	2.01	03	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19	IKM	2	IKM/ Kelompok	2	IKM/ Kelompok	2,00	IKM/ Kelompok	100,00	85,84	21	IKM/ Kelompok	20,00	17,17
3	31	02	2.01	04	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	110	IKM	22	Kelompok/IKM	22	Kelompok/IKM	22	Kelompok/IKM	100,00	99,73	132	Kelompok/IKM	20,00	19,95
3	31	02	2.01	05	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30	kali	6	Kali	6	kali	6	kali	100,00	90,64	6	kali	20,00	18,13
3	31	02	2.01	06	Meningkatnya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4	kali					-		-	-	4	kali	-	-
3	31	03			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait									-	-			-	-

3	31	03	2.01		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)									-	-		-	-	
3	31	03	2.01	01	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	8	kali				-		-	-	8	kali	-	-	
3	31	03	2.01	02	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	8	kali				-		-	-	8	kali	-	-	
3	31	04			Meningkatnya Penyediaan Sistem Informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini		100%		68%		68%			100,00	88,41		20,00	17,68	
3	31	04	2.01		Meningkatnya perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas		100%		68%		68%			100,00	88,41		20,00	17,68	
3	31	04	2.01	01	Meningkatnya Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	88,41	6	Dokumen	20,00	17,68
3	31	04	2.01	02	Meningkatnya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah dokumen Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	8	Dokumen				-		-	-	8	Dokumen	-	-	
3	31	04	2.01	03	Meningkatnya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	8	Dokumen				-		-	-	8	Dokumen	-	-	
																99,05	93,39		19,88	108,12	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu didasarkan atas perbandingan realisasi kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (performance plan). Hasil perbandingan realisasi kinerja dengan rencana kinerja disimpulkan pada empat kategori capaian, yakni sangat berhasil (rentang capaian lebih dari 100%), berhasil (rentang capaian 91 s/d 100 %), cukup berhasil, (rentang capaian 81s/d 90 %), kurang berhasil (rentang capaian kurang dari 80 %).

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan ada sebagian melebihi target kinerja yang ditentukan tetapi ada juga yang belum mencapai target yang telah ditentukan sebagaimana keterangan dibawah ini :

### Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2022

No	Nama Indikator	Penanggung Jawab	Rata-Rata Capaian %	Kategori Capaian
1	Persentasi Koperasi Aktif	Kabid Koperasi	81	Cukup Berhasil
2	Persentasi Usaha mikro menjadi usaha kecil	Kabid Usaha Mikro	100	Berhasil
3	Persentasi industri kecil dengan produk yang memenuhi standar mutu	Kabid Perindustrian	100	Berhasil
4	Persentase Fasilitasi Koperasi yang memiliki Perizinan Usaha	Kabid Koperasi	0	-
5	Persentasi Koperasi yang melaksanakan RAT	Kabid Koperasi	127	Sangat Berhasil
6	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Kabid Kopeasi	100	Berhasil
7	Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kabid Koperasi	100	Berhasil
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Kabid Koperasi	100	Berhasil
9	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Kabid Usaha Mikro	100	Berhasil
10	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	Kabid Usaha Mikro	100	Berhasil
11	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	100	Berhasil
12	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	100	Berhasil
13	Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	100	Berhasil
14	Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	0	-
15	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar	Kabid Kemetrolagian	100	Berhasil
16	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	0	-
17	Persentase Pertumbuhan IKM	Kabid Perindustrian	100	Berhasil
18	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Kabid Perindustrian	0	-
19	Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	Kabid Perindustrian	100	Berhasil

Selain kinerja pelayanan di atas ada juga kinerja pelayanan untuk mengumpulkan pendapatan dan menyetorkan ke kas daerah dari hasil pengelolaan Pasar yang ada (berupa Retribusi pelayanan sampah, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pemakaian Ruangan, Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakan dan Retribusi Tempat Parkir) tetapi untuk pengelolaan hasil pendapatan diserahkan ke kas daerah melalui Badan Pendapatan Daerah



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**  
**Kabupaten Kotabaru**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-5)	Tahun 2022 (thn n-4)	Tahun 2023 (thn n-3)	Tahun 2024 (thn n-4)	Tahun 2025 (thn n-5)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2021 (thn n-5)	
1	Persentasi Koperasi Aktif	-	-	66,39%	66,67%	66,94%	67,21%	67,48%	67,74%	53,65%	
2	Persentasi Usaha mikro menjadi usaha kecil	-	-	22,22%	24,44%	26,67%	28,89%	31,11%	33,33%	22,22%	
3	Persentasi industri kecil dengan produk yang memenuhi standar mutu	-	-	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	50,00%	
4	Persentase Fasilitasi Koperasi yang memiliki Perizinan Usaha	-	-	0,00%	26,67%	46,67%	66,67%	86,67%	100%	0,00%	
5	Persentasi Koperasi yang melaksanakan RAT	-	-	28,57%	36,36%	39,13%	41,67%	44,00%	48,00%	36,19%	
6	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	-	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	92,00%	100,00%	20,00%	
7	Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-	-	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	-	57,14%	57,14%	57,14%	57,14%	57,14%	57,14%	57,14%	
9	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	-	-	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	90,00%	100%	20,00%	
10	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	-	-	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	90,00%	100%	20,00%	
11	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	-	77,78%	83,33%	88,89%	94,44%	96,67%	100%	77,78%	
12	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	38,46%	46,15%	53,85%	61,54%	69,23%	76,92%	38,46%	
13	Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan	-	-	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	
15	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar	-	-	20%	40,00%	60%	80%	90%	100%	20%	
16	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	-	-	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	
17	Persentase Pertumbuhan IKM	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	
18	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-	0	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0	
19	Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	-	-	68%	76,00%	84,00%	92,00%	96%	100%	68%	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang tertuang dalam Renstra adalah

1. Koperasi aktif diprioritaskan sebagai target sasaran dalam peningkatan daya saing dan peningkatan kelembagaan Koperasi
2. Perkuatan Kompetensi pelaku usaha, khususnya dalam aspek berwirausaha, produktivitas, adaptasi, teknologi dan daya saing
3. Kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB relative masih rendah
4. Perlunya peningkatan penyediaan bahan, infrastruktur, pelatihan, operasional rumah kemasan
5. Sumberdaya manusia dunia usaha yang masih belum menunjukkan semangat wirausaha yang tinggi dalam mengelola dan mengembangkan usahanya;
6. Tuntutan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien dan murah, yang didukung dengan sarana prasarana perdagangan;
7. Semakin terbukanya arus informasi dan modernisasi yang mengharuskan setiap aparatur meningkatkan kualitas dan kapasitasnya sebagai pelayan masyarakat;
8. Diberlakukannya pasar bebas China-Asean atau yang lebih dikenal dengan China Asean Free Trade Area (CAFTA) mulai tahun 2010, yang mengharuskan produk barang dan jasa para pelaku usaha dalam negeri dapat bersaing dengan produk-produk China;

Perlu ada komitmen bersama dalam memberikan peningkatan pelayanan di bidang perkoperasian, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan criteria standart yang objektif dan transparan.

Permasalahan dan hambatan yang merupakan kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Kendala Internal
  - a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur Pembina
  - b. Terbatasnya sarana mobilitas
  - c. Terbatasnya anggaran pembinaan

## 2. Kendala Eksternal

- a. Terbatasnya kualitas SDM Koperasi, Usaha Kecil dan Industri
- b. Terbatasnya akses permodalan
- c. Terbatasnya akses pasar dan kemitraan

Dampak kendala terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program adalah kurang optimalnya penyelenggaraan Program pembangunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja pelayanan SKPD sangat terkait dengan beberapa isu penting baik internal maupun eksternal, antara lain.

### ➤ Isu-isu Internal :

1. Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, karena ketersediaan SDM yang memiliki skil, keahlian dan pengetahuan terhadap pekerjaan akan sangat menentukan kualitas kebijakan dan pelayanan publik SKPD. Kondisi SDM Dinas Perdagangan tidak memiliki tenaga ahli dibidang pembangunan dan pengadaan barang dan jasa terkecuali dibidang kemetrolagian
2. Memiliki tingkat responsibilitas yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan belum sebanding dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Iklim dan budaya kerja yang terbangun dilingkungan SKPD. Ini merupakan salah satu faktor pendorong (positif) atau justru sebaliknya menjadi penghambat (negatif) dalam pencapaian kinerja SKPD. Sejauh ini iklim dan budaya kerja dilingkungan Dinas perdagangan cukup kondusif dalam mendukung pencapaian kinerja SKPD, meskipun belum sepenuhnya optimal.
4. Sarana dan prasarana pendukung. Kedudukan sarana dan prasarana hampir sama pentingnya dengan ketersediaan SDM yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Dinas Perdagangan masih sangat terbatas.
5. Koordinasi yang terbangun di lingkungan Dinas Perdagangan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

➤ Isu-isu Eksternal :

1. Isu strategis di bidang perdagangan adalah belum baiknya system distribusi barang dan jasa serta masih rendahnya akses pasar luar negeri. Hal ini ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. Belum membaiknya system distribusi barang ini merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata dengan baik (sarana pasar dan infrastruktur transportasi), belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen, serta terbatasnya sarana penyimpanan di tingkat produksi. Demikian halnya dengan kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik antar provinsi maupun antar kawasan strategis. Disamping itu, permasalahan lainnya yang perlu memperoleh perhatian adalah masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen. Sedangkan rendahnya akses pasar luar negeri merupakan dampak dari belum berkembangnya sistem informasi pasar termasuk rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk market intelegent), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.

Beberapa isu-isu penting tersebut diatas merupakan tantangan sekaligus peluang yang menjadi starting point juga sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kepala daerah yang terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten kotabaru Tahun 2021 – 2026.

Tujuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil
2. Meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal

Untuk Mewujudkan tujuan, dirumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efisien transparansi dalam mewujudkan koperasi yang aktif
2. Meningkatnya pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil

3. Meningkatnya sarana prasarana perdagangan dan pelayanan kemetrolagian
4. Meningkatnya kualitas industri kecil pengolahan berbasis produk lokal

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, industri, sarana prasarana perdagangan dan Kemetrolagian adalah meningkatkan peluang pasar, kewirausahaan dan kemitraan pada sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian maupun meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur Pembina, pengadaan sarana mobilitas, meningkatkan anggaran pembinaan.

Rekomendasi strategis untuk pencapaian program dan kegiatan adalah meningkatkan kualitas SDM Koperasi, Usaha Kecil dan Industri, memperluas akses permodalan, pasar dan kemitraan, dalam upaya pengembangan berbagai bentuk usaha, manajemen dan kelembagaan usaha, menuju peningkatan produktivitas, kualitas dan efesiensi meningkatnya jumlah anggota dan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat demikian juga peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Pembina, penyediaan sarana mobilitas dan anggaran yang proporsional.

#### A. Daftar Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru

NO	NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT	KET
1	KHAIRIL FAJRI,S.STP NIP. 19730503 199403 1009	Kepala Dinas Pembina Utama Muda (IV/c)	
2	JURAINAH, SE.,MM NIP. 19740829 200312 2 005	Sekretaris Penata Tk.1 (III/d)	
3	ARY MARDANI,ST.MT NIP. 19790422 200312 1 008	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan Pembina (IV/a)	
4	H. HASAN BASRI,S.Pd NIP. 19660823 199203 1 004	Kabid Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan Pembina (IV/a)	
5	Drs.YUSUF PALINDANG, MM NIP. 19670101 200604 1 027	Kabid Koperasi Pembina (IV/a)	
6	IDA TRISANTI, S.Si NIP. 19791005 201001 2 011	Plt. Kabid Perindustrian Penata (III/c)	
7	Hj. MARIA HERNIATI,S.Pd.,MM NIP. 19641028 198412 2 004	Pengawas Koperasi Pembina (IV/a)	
8	GUSTI NORHAYATI NIP.19640905 198502 2 001	Kasubbag Keuangan Penata Tk. I (III/d)	
9	SURIYATI NIP. 19640820 198602 2 004	Pengawas Koperasi Penata Tk. I (III/d)	
10	MOHAMMAD IRWAN,SE NIP. 19640204 198903 1 011	Pengawas Perdagangan Penata Tk. I (III/d)	
11	H. AGUS NADI,S.AP.,MM NIP. 19690804 199002 1 001	Pengawas Koperasi Penata Tk. I (III/d)	
12	Hj. MARIANA,S.Sos.,MM NIP. 19731214 199703 2 005	Kasubag Perencanaan Penata Tk. I (III/d)	
13	SRI ASIH HANDAYANI,SE NIP. 19680525 199303 2 008	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penata Tk. I (III/d)	
14	HUSNI ARIFIN NIP. 19640824 199311 1 001	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penata Tk.1 (III/d)	
15	PUKUNAMA, SE NIP. 19700616 199303 2 008	Penguji Mutu Barang Penata Tk.1 (III/d)	
16	HJ. YULIANI EMBARINA GINTING, SE	Pengawas Koperasi	

	NIP. 19800723 200901 2 004	Penata Tk.1 (III/d)	
17	Syarifah Fatimah, Amd NIP. 19760812 200312 2 006	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Penata (III/c)	
18	ST.HARLIAH, SE NIP. 19660530 200604 2 006	Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop Penata (III/c)	
19	NURMASITAH,S.Ag NIP. 19770628 200801 2 014	Analisis Teknologi Industri Penata (III/c)	
20	RAKHMANI,BcKN NIP. 19660509 200701 1 016	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Penata Muda Tk. 1 (III/b)	
21	AKHLIS AKHYARI,ST NIP. 19810209 201403 1 001	Penera Penata Muda Tk. 1 (III/b)	
22	NADIA PRATIWI,S.Si NIP. 19930902 201503 2 002	Penera Penata Muda Tk.1 (III/b)	
23	MASHURI ROSYADI,SE NIP. 19840807 200312 1 006	Fasilitator Kewirausahaan Penata Muda Tk. 1 (III/b)	
24	SYAFRUDDIN NOOR,SE NIP. 19720601 200604 1 026	Analisis Pengawas Mutu Produk Penata Muda Tk.1 (III/b)	
25	RABYATUL PAJERI NIP. 19790306 201001 1 013	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar Penata Muda (III/a)	
26	ROSLAWATI NIP. 19791108 200801 2 013	Fasilitator Promosi Penata Muda (III/a)	
27	ARIYANI,SE NIP. 19810528 200801 2 019	Analisis Perdagangan Penata Muda (III/a)	
28	JANATUL ADAWIYAH NIP. 19841005 200901 2 001	Calon Penera Penata Muda (III/a)	
29	SYARIPUDINNOOR,SE NIP. 19770905 200701 1 010	Verifikator Keuangan Penata Muda (III/a)	
30	NUR ADITIYA LESTARI, SE NIP. 19960813 201903 2 006	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penata Muda (III/a)	
31	MUSYAFIRAH NIP. 19660403 200701 2 009	Pengadministrasi Keuangan Pengatur Tk. I (II/d)	
32	SAMSIR ALAM NOOR NIP. 19690715 200701 1 039	Juru Pungut Retribusi Pengatur Tk.1 (II/d)	
33	SUBRIANSYAH NIP. 19700304 20701 1 030	Juru Pungut Retribusi Pengatur Tk.1 (II/d)	
34	SITI HIDAYAH NIP. 1970083 200701 2 016	Pengadministrasi Keuangan Pengatur Tk.1 (II/d)	
35	MOHD. IKHSAN NIP. 19750801 200701 1 014	Pengelola Distribusi dan Pemasaran Pengatur Tk.1 (II/d)	
36	SYAHRIADI NIP. 19760412 200701 1 022	Pengelola Distribusi dan Pemasaran Pengatur Tk.1 (II/d)	
37	MUHAMMAD ROHADI NIP. 19750624 200801 1 012	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Pengatur Tk.1 (II/d)	
38	IRWAN NOOR NIP. 19730707 201001 1 009	Pengelola Dokumen Perizinan Pengatur Tk.1 (II/d)	
39	DARMANSYAH NIP. 19761217 200701 1 007	Pengelola Distribusi Pemasaran Pengatur Muda Tk. I (II/d)	
40	M. ISWAN NOOR NIP. 19790416 200604 1 017	Bendahara Penerimaan Pengatur (II/c)	
41	SABRANSYAH NIP. 19761104 201001 1 010	Pengelola Dokumen Perizinan Pengatur (II/c)	
42	NUR KUMALA NIP. 19700810 200701 2 020	Verifikator Keuangan Pengatur (II/c)	
43	YUDHI SAPUTRA 19800523 200701 1 009	Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk Pengatur (II/c)	
44	MAHDIAN NOOR NIP. 19800905 200801 1 013	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Pengatur (II/c)	
45	AKHMAD YAMANI NIP. 19700428 200604 1 009	Juru Pungut Retribusi Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
46	NURUL MAHRITA NIP. 19790927 201212 2 001	Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop Pengatur (II/c)	
47	EGAH SURYA KISMADJA NIP. 19850219 201212 2 001	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha Pengatur (II/c)	
48	DARMAWAN	Pengelola Sarana dan Prasarana	

	NIP. 19660422 201212 2 001	Pengatur (II/c)	
49	ARDIANSYAH NIP. 19700721 201001 1 004	Pengelola Sarana dan Prasarana Pengatur (II/c)	
50	MUHAMMAD AKIB NIP. 19750810 201001 1 004	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Pengatur (II/c)	
51	MUHAMMAD GAFURI NIP. 19761212 200701 1 009	Juru Pungut Retribusi Pengatur Muda Tk.1 (II/b)	
52	MISRANSYAH NIP. 19780414 200901 1 009	Juru Pungut Retribusi Pengatur Muda Tk. 1 (II/b)	
53	AHMAD ABD. RAHMAN NIP. 19850202 201001 1 018	Pengadministrasi Umum Pengatur Muda (II/b)	
54	HASAN BASRI NIP. 19740410 200701 1 018	Juru Pungut Retribusi Pengatur (II/a)	
55	SABRAN NIP. 19750415 200701 1 021	Juru Pungut Retribusi Juru Muda (I/d)	
56	RAHMADI NIP. 19801208 201001 1009	Juru Pungut Retribusi Juru (I/c)	
57	MUHAMMAD HATTA NIP. 19670307 201001 1 004	Juru Pungut Retribusi Juru (I/c)	
58	HAMSI MUBARA NIP. 19641107 200801 1 003	Pengadministrasi Umum Juru (I/c)	
59	BARNIAH NIP. 19720707 200701 2 019	Pengadministrasi Umum Juru (I/c)	
60	MISRAN NIP. 19720817 200701 1 030	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar Juru Muda (I/c)	
61	JUNAIDI NIP. 19620508 200701 1 003	Pengadministrasi Umum Juru Muda Tk. I (I/b)	
62	JURIADI 19810201 201212 1 003	Pengadministrasi Umum Juru Muda Tk. I (I/b)	

## B. Data Kepangkatan

No	Gol/Ruang	Jumlah
1	IV/c	1 orang
2	IV/b	0 orang
3	IV/a	4 orang
4	III/d	10 orang
5	III/c	3 orang
6	III/b	5 orang
7	III/a	7 orang
8	II/d	10 orang
9	II/c	10 orang
10	II/b	4 orang
11	II/a	1 orang

12	I/d	1 orang
13	I/c	3 orang
14	I/b	3 orang
<b>Jumlah</b>		<b>62 orang</b>

### C. Data Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S.3	0 orang
2	S.2	6 orang
3	S.1	15 orang
4	D.III	2 orang
5	D.II	-
6	SLTA	32 orang
7	SLTP	7 orang
<b>Jumlah</b>		<b>62 orang</b>

### D. Data Diklat

No	Sudah Diklat Pim	Jumlah
1	II	1 orang
2	III	2 orang
3	IV	15 orang
<b>Jumlah</b>		<b>18 orang</b>

### E. Uraian Tugas

1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
  - a. merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  - c. menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas Dinas;
  - d. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja program/ kegiatan pengelolaan kesekretariatan Dinas;
  - e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang koperasi;
  - f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang usaha mikro;
  - g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang perindustrian;
  - h. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang Kemetrologian pengawasan perdagangan;
  - i. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang stabilitasi dan sarana distribusi perdagangan;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait pelayanan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;
  - l. menyelenggarakan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Dinas;
  - m. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja UPTD; dan
  - n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian.
- a. merencanakan dan merumuskan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
  - b. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sekretariat;
  - c. menyelia pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
  - e. menetapkan laporan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
  - f. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  - g. mendisposisikan kegiatan kepada sub bagian yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
  - h. menyelenggarakan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;
  - i. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;
  - j. menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan perlengkapan;
  - k. merumuskan dan memeriksa penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), KUA-PPAS, RKA, RKAP dan

Laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;

- l. merumuskan, memeriksa dan menyelia pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
- m. merumuskan, memeriksa dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- n. merumuskan dan memeriksa penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- o. merumuskan dan memeriksa penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;
- p. memfasilitasi penerimaan pegawai tidak tetap dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dan penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil lingkup Dinas meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, Daftar Urut Kependidikan (DUK), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian lainnya;
- q. memberikan usul dan saran kepada Kepala Dinas selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
- r. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- s. melaksanakan pengkoordinasian Bidang dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di bidang koperasi yang meliputi kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi.
- a. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang koperasi yang meliputi kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi;
  - b. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi;
  - c. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi;
  - e. menetapkan laporan program kerja di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi;
  - f. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - g. memeriksa data dan jumlah koperasi yang akurat;
  - h. memeriksa data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
  - i. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
  - j. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
  - k. mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
  - l. mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
  - m. mengkoordinasikan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- n. mengkoordinasikan Pengawasan Koperasi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- p. mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- q. mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- r. mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- s. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- t. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- u. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- v. mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
- w. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- x. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- z. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- aa. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
- bb. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang usaha mikro yang meliputi pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro dan pengembangan kewirausahaan.
- a. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang pembinaan Usaha Mikro, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro serta pengembangan Kewirausahaan;
  - b. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan Usaha Mikro, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro serta pengembangan Kewirausahaan;
  - c. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan Usaha Mikro, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro serta pengembangan Kewirausahaan;
  - d. menetapkan laporan program kerja di bidang pembinaan Usaha Mikro, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro serta pengembangan Kewirausahaan;
  - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha mikro meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
  - f. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - g. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro didalam dan luar negeri;
  - h. mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
  - i. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
  - j. mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
  - k. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  - l. mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang dapat bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
  - m. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
  - n. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;

- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - q. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
  - r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di bidang perindustrian yang meliputi pemberdayaan dan inovasi industri, pembangunan dan pengembangan industri dan sistem informasi dan fasilitasi industri.
- a. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang pemberdayaan dan inovasi industri, pembangunan dan pengembangan industri dan sistem informasi dan fasilitasi industri;
  - b. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan inovasi industri, pembangunan dan pengembangan industri dan sistem informasi dan fasilitasi industri;
  - c. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan dan pengembangan pembangunan industri, perizinan dan inovasi industri, dan sistem informasi industri;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang pemberdayaan dan inovasi industri, pembangunan dan pengembangan industri dan sistem informasi dan fasilitasi industri;
  - e. menetapkan laporan program kerja di bidang pemberdayaan dan inovasi industri, pembangunan dan pengembangan industri dan sistem informasi dan fasilitasi industri;
  - f. merekomendasikan Izin Usaha Industri (IUI) Mikro;
  - g. merekomendasikan IPUI bagi industri mikro;
  - h. merekomendasikan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan IPKI;
  - i. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  - j. mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
  - k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

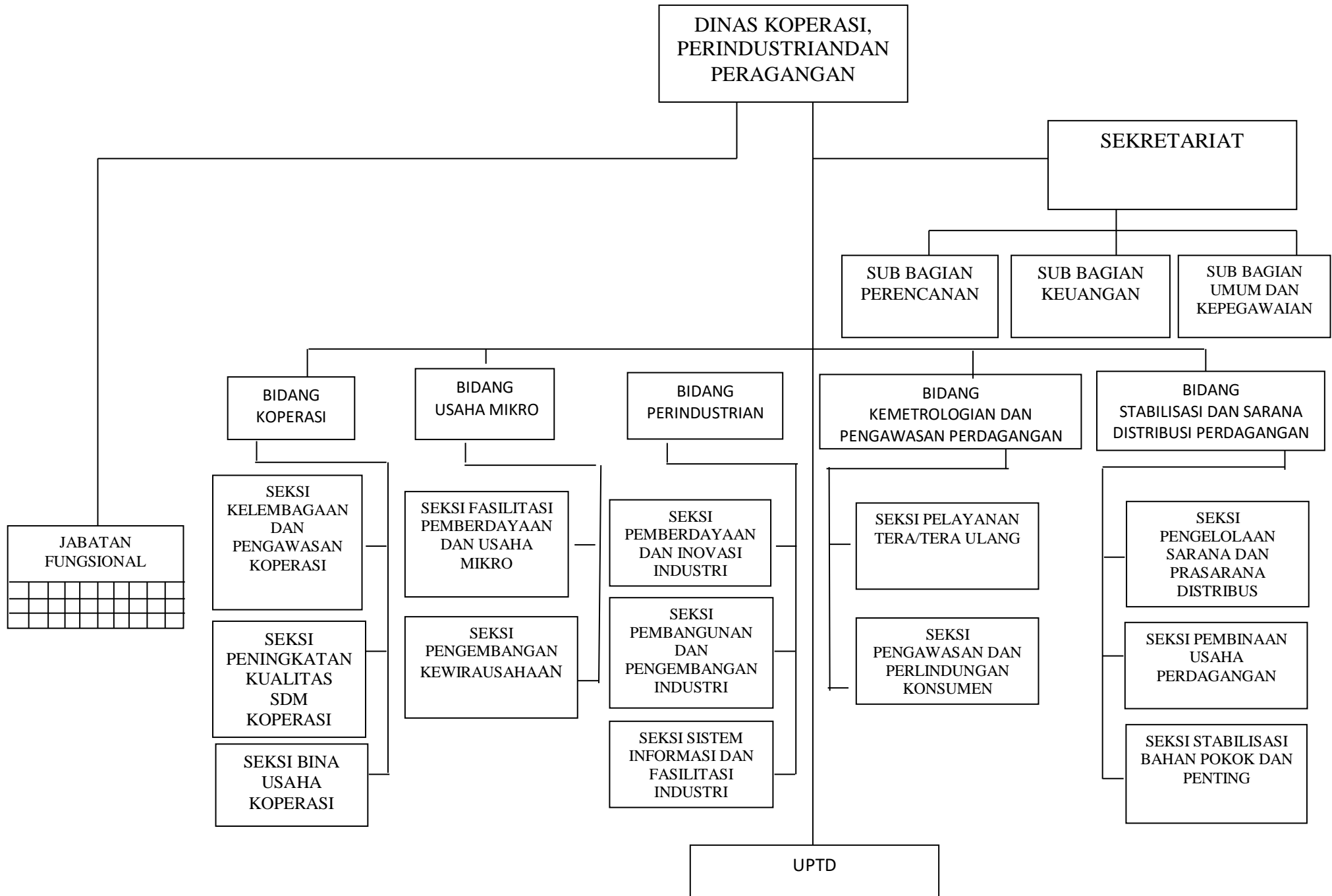
- l. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
  - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
  - n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - o. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
  - p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas–tugas di bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan yang meliputi pelayanan tera dan tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan.
- a. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang pelayanan tera/tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
  - b. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan tera/tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
  - c. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang pelayanan tera/tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang pelayanan tera/tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
  - e. menetapkan laporan program kerja di bidang pelayanan tera/tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
  - f. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - g. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

- h. mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
  - i. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
  - l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - m. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan yang meliputi pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting.
- a. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting;
  - b. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting;
  - c. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting;

- e. mensosialisasikan kebijakan dan program kerja di bidang pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting;
- f. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- h. mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
- i. memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah**

1. Proses yang dilakukan adalah menyusun Rancangan dengan menetapkan kriteria alternatif yang terbaik, baik yang telah ditentukan berdasarkan urusan pemerintahan, program dan kegiatan maupun melalui perencanaan partisipatif melalui musrenbang baik Desa, Kecamatan maupun Kabupaten, dan Usulan Rancangan awal RKPD dengan penyediaan anggaran terjadi *axes financial account* artinya jumlah yang diusulkan lebih besar dari dana yang tersedia.
2. Proses ini dilakukan berpedoman pada UU nomor 25 tahun 2004, tentang SPPU dan Permendagri nomor 13 tahun 2006, jo; Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan keuangan daerah.
3. Temuan setelah proses tersebut adalah berubahnya nilai anggaran yang disediakan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah karena proses dinamika anggaran yang terjadi.

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2023**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal Perangkat Daerah						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif
	<b>NON URUSAN</b>					<b>11.432.100.000</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>11.105.121.070</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>	<b>11.432.100.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>	<b>11.105.121.070</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Pesentase kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>1.025.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Pesentase kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>313.500.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	475.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	213.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	125.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Laporan	125.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Laporan	100.000.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase kualitas pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>7.410.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase kualitas pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>8.974.927.500</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan	6.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan	6.878.875.300
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	650.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.518.177.200

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	220.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	573.375.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.500.000
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	7.000.000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Laporan	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	7.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.000.000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>-</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>-</b>
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	

	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dokumen			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dokumen	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		Dokumen			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		Dokumen	
	(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Kab. Kotabaru						(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)					
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		Laporan			Pengolahan Data Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		Laporan	
	(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Kab. Kotabaru						(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)					
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		Dokumen			Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		Dokumen	
	(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Kab. Kotabaru						(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)					
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Dokumen			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Dokumen	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>260.000.000</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	260.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Kotabaru	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		Orang			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Kotabaru	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		Orang	
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Laporan			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Laporan	
	Pemindahan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah ASN yang pindahtugaskan		Orang			Pemindahan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah ASN yang pindahtugaskan		Orang	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kotabaru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kotabaru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat</b>		<b>100%</b>	<b>1.305.500.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat</b>		<b>100%</b>	<b>927.676.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	32.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	29.950.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	27.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	25.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	27.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	760.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	488.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	37.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	35.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	7.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	7.500.000
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14	Laporan	45.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14	Laporan	42.050.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan	370.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan	300.176.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>54.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>100%</b>	<b>33.890.570</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	

	Pengadaan Alat Besar	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		Unit		Pengadaan Alat Besar	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		Unit	
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		Unit		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		Unit	
	Pengadaan Mebel	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	27.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	27.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	33.890.570
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Unit		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Unit	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Kualitas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>702.600.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Kualitas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>620.600.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	16.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	15.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	550.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	461.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	136.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	144.600.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>675.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>234.527.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	153.977.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Kotabaru	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Kotabaru	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		Unit	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Kotabaru	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Kotabaru	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Unit	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kotabaru	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit		Pemeliharaan Mebel	Kab. Kotabaru	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	80.550.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Kotabaru	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Kotabaru	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	275.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab. Kotabaru	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		Ha		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab. Kotabaru	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		Ha	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>					<b>2.803.000.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>					<b>1.250.060.000</b>
	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>		<b>Persentase pertumbuhan Koperasi</b>		<b>46,67%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>		<b>Persentase pertumbuhan Koperasi</b>		<b>46,67%</b>	<b>-</b>
	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>45,00%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>45,00%</b>	<b>-</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	Unit Usaha	25.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	Unit Usaha	
	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>		<b>50,00%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>		<b>50,00%</b>	<b>-</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit Usaha	25.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit Usaha	

	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		Persentasi Koperasi yang melaksanakan RAT		39,13%	290.000.000	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		Persentasi Koperasi yang melaksanakan RAT		39,13%	290.000.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		39,13%	290.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		39,13%	290.000.000
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Unit Usaha	130.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Unit Usaha	130.000.000
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	4	Unit Usaha	160.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Unit Usaha	160.000.000
	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>		Persentase Koperasi yang berprestasi		60,00%	80.000.000	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>		Persentase Koperasi yang berprestasi		60,00%	-
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		60,00%	80.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		60,00%	-
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10	Unit Usaha	40.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Unit Usaha	
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	10	Unit Usaha	40.000.000	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Unit Usaha	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian		47,62%	320.000.000	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian		47,62%	100.000.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian		47,62%	320.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian		47,62%	100.000.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kotabaru	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60	Orang	320.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kotabaru	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	60	Orang	100.000.000
	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota						Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM					
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro					
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</b>		<b>57,14%</b>	<b>120.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</b>		<b>57,14%</b>	<b>90.000.000</b>
	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah</b>		<b>57,14%</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah</b>		<b>57,14%</b>	<b>90.000.000</b>
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Unit Usaha	120.000.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Unit Usaha	90.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Keluarga		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Keluarga	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>		<b>60,00%</b>	<b>1.170.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>		<b>60,00%</b>	<b>360.000.000</b>
	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		<b>Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		<b>60,00%</b>	<b>1.170.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		<b>Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		<b>60,00%</b>	<b>360.000.000</b>
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	160	Orang	600.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	160	Orang	200.000.000
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	10	Unit Usaha	120.000.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	10	Unit Usaha	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60	Unit Usaha	150.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	60	Unit Usaha	160.000.000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60	Unit Usaha	150.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	60	Unit Usaha	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30	Orang	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30	Orang	

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		<b>Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan</b>		<b>60,00%</b>	<b>773.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		<b>Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan</b>		<b>60,00%</b>	<b>410.060.000</b>
	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>		<b>Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha</b>		<b>60,00%</b>	<b>773.000.000</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>		<b>Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha</b>		<b>60,00%</b>	<b>410.060.000</b>
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	128	Unit Usaha	773.000.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	128	Unit Usaha	410.060.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>20.045.000.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>2.389.100.000</b>
	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>		<b>88,89%</b>	<b>1.285.000.000</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>		<b>88,89%</b>	<b>200.000.000</b>
	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>		<b>Persentase Rekomendasi pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan</b>		<b>100%</b>	<b>155.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>		<b>Persentase Rekomendasi pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kotabaru	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8	Dokumen	155.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8	Dokumen	
	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		<b>Persentase Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		<b>85,00%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		<b>Persentase Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		<b>85,00%</b>	<b>100.000.000</b>
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	8	Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	8	Dokumen	100.000.000
	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>		<b>Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>		<b>100%</b>	<b>220.000.000</b>	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>		<b>Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	8	Dokumen	110.000.000	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	8	Dokumen	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	5	Dokumen	110.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	5	Dokumen	
	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar</b>		<b>Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba</b>		<b>100%</b>	<b>270.000.000</b>	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar</b>		<b>Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>

	Negeri		Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri				Negeri					
	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Kab. Kotabaru	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	8	Dokumen	160.000.000	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Kab. Kotabaru	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	8	Dokumen	-
	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	8	Dokumen	110.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	8	Dokumen	-
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	40,00%		110.000.000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	40,00%		-
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Kotabaru	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10	Dokumen	110.000.000	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	10	Dokumen	-
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	40,00%		330.000.000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	40,00%		-
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8	Laporan	110.000.000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8	Laporan	-
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	8	Dokumen	110.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	8	Dokumen	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	8	Laporan	110.000.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	8	Laporan	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	88,89%		100.000.000	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	88,89%		100.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	8	Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	8	Dokumen	100.000.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI</b>		<b>Persentase pembangunan Sarana Distribusi</b>	<b>53,85%</b>		<b>16.780.000.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI</b>		<b>Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>53,85%</b>		<b>1.714.100.000</b>

	<b>PERDAGANGAN</b>		<b>Perdagangan</b>				<b>PERDAGANGAN</b>					
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		27,69%	16.600.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		27,69%	1.634.100.000
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	16.500.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	1.424.100.000
			- Rehab drainase lingkungan pasar kemakmuran (1.500.000.000)						- Rehab drainase lingkungan pasar kemakmuran (1.500.000.000)			
			- Rehab berat bangunan'Gedung limbur raya (3.500.000.000)						- Rehab berat bangunan'Gedung limbur raya (3.500.000.000)			
			- Rehab berat bangunan pasar subuh pasar kemakmuran (3.500.000.000)						- Rehab berat bangunan pasar subuh pasar kemakmuran (3.500.000.000)			
			- Rehab berat bangunan pasar blok B/ F pasar Kemakmuran (Lanjutan) (6.000.000.000)						- Rehab berat bangunan pasar blok B/ F pasar Kemakmuran (Lanjutan) (6.000.000.000)			
			- Rehab atap pasar ikan /sayur /daging (2.000.000.000)						- Rehab atap pasar ikan /sayur /daging (2.000.000.000)			
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	48	Unit	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	48	Unit	210.000.000
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		32,31%	180.000.000	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		32,31%	80.000.000
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50	Dokumen	70.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50	Dokumen	80.000.000
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30	Dokumen	110.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30	Dokumen	
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</b>		<b>100%</b>	<b>730.000.000</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</b>		<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100%	280.000.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100%	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan	110.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	24	Laporan	110.000.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	24	Laporan	

	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>	<b>270.000.000</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	96	Laporan	110.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	96	Laporan	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96	Laporan	60.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96	Laporan	100.000.000
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4	Laporan	
	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>36,36%</b>	<b>180.000.000</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>36,36%</b>	<b>-</b>
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	6	Dokumen	60.000.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	6	Dokumen	
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6	Laporan	60.000.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6	Laporan	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6	Laporan	60.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6	Laporan	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan</b>		<b>100%</b>	<b>660.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>
	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>	<b>660.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	48	Pelaku Usaha	160.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	48	Pelaku Usaha	
	Pameran Dagang Nasional	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2	Pelaku Usaha	210.000.000	Pameran Dagang Nasional	Kab. Kotabaru	Jumlah Pameran Dagang Nasional	2	Pelaku Usaha	
	Pameran Dagang Lokal	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2	Pelaku Usaha	110.000.000	Pameran Dagang Lokal	Kab. Kotabaru	Jumlah Pameran Dagang Lokal	2	Pelaku Usaha	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	40	Pelaku Usaha	60.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Kotabaru	Jumlah Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	40	Pelaku Usaha	

	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kotabaru	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	40	Produk	60.000.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kotabaru	Jumlah Peningkatan Citra Produk Ekspor	40	Produk	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	40	Pelaku Usaha	60.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Kotabaru	Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	40	Pelaku Usaha	
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar</b>		<b>60%</b>	<b>440.000.000</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar</b>		<b>60%</b>	<b>325.000.000</b>
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		60%	440.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		60%	325.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Kab. Kotabaru	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	650	Unit	150.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	650	Unit	150.000.000
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30	orang	120.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	30	orang	85.000.000
	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	300	Unit	170.000.000	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyidikan Metrologi Legal	300	Unit	90.000.000
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri</b>		<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri</b>		<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100%	150.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100%	50.000.000
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2	Kali	50.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2	Kali	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2	Kali	50.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2	Kali	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2	Kali	50.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2	Kali	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					<b>2.220.000.000,00</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					<b>860.000.000,00</b>
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Persentase Pertumbuhan IKM</b>		<b>60%</b>	<b>1.920.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Persentase Pertumbuhan IKM</b>		<b>60%</b>	<b>745.000.000,00</b>
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase hasil penerapan RPIK yang ditetapkan menjadi perda		60%	1.920.000.000,00	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase hasil penerapan RPIK yang ditetapkan menjadi perda		60%	745.000.000,00
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	125.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	Dokumen	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	Dokumen	20.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	350.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	150.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	950.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	295.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	400.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	300.000.000
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	75.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>		<b>4,39%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>		<b>4,39%</b>	<b>15.000.000</b>
	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>		<b>Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>		<b>4,39%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>		<b>Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</b>		<b>4,39%</b>	<b>15.000.000</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1	Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1	Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan	1	Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1	Dokumen	15.000.000

			Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini</b>		<b>84,00%</b>	<b>240.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini</b>		<b>84,00%</b>	<b>100.000.000</b>
	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas</b>		<b>84,00%</b>	<b>240.000.000</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas</b>		<b>84,00%</b>	<b>100.000.000</b>
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	200.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	100.000.000
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2	Dokumen	20.000.000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Kotabaru	Jumlah Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	2	Dokumen	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2	Dokumen	20.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2	Dokumen	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

### **1. Usulan Program kegiatan dilakukan melalui :**

#### **a. Proses kriteria Tehnokratif**

Yaitu menyesuaikan dengan program/kegiatan baku yang telah disediakan baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten, yang dilakukan oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan.

#### **b. Proses Politik**

Yaitu usulan yang dilakukan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

#### **c. Proses Partisipatif**

Yaitu usulan yang melibatkan stakeholders melalui musrenbang.

#### **d. Proses Bottom up dan Topdown, yaitu memformulasikan usulan dari atas ke bawah dan dari bawah keatas yang tentunya disesuaikan dengan RPJMD.**

### **2. Kesesuaian usulan dengan isu-isu prinsip penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, adalah :**

#### **a. Mendorong koordinasi antar pelaku pembangunan**

#### **b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang , antar waktu, antar fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah.**

#### **c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.**

#### **d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat**

#### **e. Menjamin tercapainya penyusunan sumber daya secara efisien dan efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.**

Tabel 2.4

## Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Kecamatan		Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
1	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Cantung Kanan, Kab. Kotabaru	Hampang	Cantung Kanan				
2	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Hulu Sampanahan, Kab. Kotabaru	Hampang	Hulu Sampanahan				
3	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma PKK RT.001/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
4	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma PKK RT.001/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
5	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemeras Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma PKK RT.002/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
6	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Tapak Dara Naga RT.003/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
7	Bantuan Peralatan Pengolahan Aneka Kacang dan Kue Kering	Dasawisma Mawar Jeruk PKK RT.004/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
8	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Mawar Jeruk PKK RT.004/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
9	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	Pasar Translama RT.003/001 Dusun 01, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
10	Bantuan Pengadaan Mesin Sablon Listrik (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Karang Taruna Tunas Sakti Dusun 01 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
11	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Karang Taruna Tunas Sakti Dusun 01 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
12	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dusun 01 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
13	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Melati Durian PKK RT.005/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
14	Bantuan Peralatan Pengolahan Aneka Kacang dan Kue Kering	Dasawisma Melati Durian PKK RT.005/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
15	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Melati Pir PKK RT.007/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
16	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Lingkungan RT.007/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
17	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Melati Banana PKK RT.008/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
18	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Melati Banana PKK RT.008/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
19	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Melati Sawo PKK RT.009/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
20	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Melati Sawo PKK RT.009/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: -pemasangan keramik,-rehab kios, -pengecatan)	Pasar Desa Lalapin RT.009/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
22	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -	Dasawisma RT.010/002 Lalapin, Kab.	Hampang	Lalapin				

	nama kelompok, -alamat, no. hp)	Kotabaru						
23	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma RT.010/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
24	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	PKK Desa Lalapin RT.010/002, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
25	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	PKK Desa Lalapin RT.010/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
26	Bantuan Peralatan Pengolahan Aneka Kacang dan Kue Kering	PKK Desa Lalapin RT.010/002, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
27	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma PKK RT.011/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
28	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma PKK RT.011/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
29	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Matahari Jambu RT.013/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
30	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Matahari Jambu RT.013/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
31	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 02 Desa Limbur, Kab. Kotabaru	Hampang	Limbur				
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: - pemasangan keramik,-rehab kios, -pengecatan)	Jl. Eks. Kodeco, Km.84, Salat RT.02, Desa Peramasan Dua Kali Sanga, Kab. Kotabaru	Hampang	Peramasan Dua Kali Sanga				
33	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Eks. Kodeco, Km.84, Hapiring RT.03, Desa Peramasan Dua Kali Sanga, Kab. Kotabaru	Hampang	Peramasan Dua Kali Sanga				
34	Pembangunan Kios Pasar (syarat yang diperlukan: min 5 bh kios uk.20x15m)	RT.4 Desa Magalau Hilir, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Magalau Hilir				
35	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Rt. 001-Rt. 005, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Magalau Hilir				
36	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Magalau Hulu, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Magalau Hulu				
37	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Magalau Hulu, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Magalau Hulu				
38	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	RT 3 Siayuh, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Siayuh				
39	Pembangunan Kios Pasar (syarat yang diperlukan: min 5 bh kios uk.20x15m)	rt 08, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Siayuh				
40	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	rt 09, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Siayuh				
41	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	desa siayuh, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Siayuh				
42	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	Desa Mandala, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Mandala				
43	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Mandala, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Mandala				
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: - pemasangan keramik,-rehab kios, -pengecatan)	rt 03, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Pelajau Baru				
45	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	SERONGGA, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Serongga				
46	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	SERONGGA, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Serongga				
47	Pembangunan Kios Pasar (syarat yang diperlukan: min 5 bh kios uk.20x15m)	Jalan Gajah Mada Desa Telagasari, kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Telagasari				
48	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jalan Gajah Mada Desa Telagasari, kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Telagasari				

49	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	Desa Bangkalaan Dayak Rt 01, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hulu	Bangkalan Dayak				
50	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemeras Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Bangkalaan Dayak, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hulu	Bangkalan Dayak				
51	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hulu	Cantung Kiri Hilir				
52	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Karang Payau, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hulu	Karang Payau				
53	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Karang Payau, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hulu	Karang Payau				
54	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Laburan, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hulu	Laburan				
55	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: -pemasangan keramik,-rehab kios, -pengecatan)	RT 002, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pantai				
56	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	RT 002, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pantai				
57	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 008, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pantai				
58	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 002, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pantai				
59	Bantuan Pengadaan Peralatan Industri Kerajinan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Rt.01 s/d 04, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pembelacanan				
60	Bantuan Pengadaan Peralatan Industri Kerajinan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Rt.01 s/d 04, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pembelacanan				
61	Bantuan Pengadaan Peralatan Industri Kerajinan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Rt.01 s/d 04, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pembelacanan				
62	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sukamaju, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Suka Maju				
63	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tanjung Pangga RT. 01 S/D 04, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Tanjung Pangga				
64	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.005 Desa Geronggang, Kab. Kotabaru	Kelumpang Tengah	Geronggang				
65	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sebuli, Kab. Kotabaru	Kelumpang Tengah	Sebuli				
66	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, Kab. Kotabaru	Kelumpang Tengah	Tebing Tinggi				
67	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Pudi Seberang				
68	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Sulangkit				
69	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	DESA SUNGAI HANYAR RT 02 RW 00 KEC.KELP UTARA, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Sungai Hanyar				
70	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sungai Seluang, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Sungai Seluang				
71	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	desa, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Sungai Seluang				
72	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 03, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Wilas				
73	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 01, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Wilas				
74	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	jl.desa rt.3, Kab. Kotabaru	Pamukan Barat	Mangka				

75	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Mayangsari Rt 10, Kab. Kotabaru	Pamukan Barat	Mayang Sari				
76	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Mayangsari Rt 13 Kec Pamukan Barat, Kab. Kotabaru	Pamukan Barat	Mayang Sari				
77	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 001/001, Kab. Kotabaru	Pamukan Barat	Sengayam				
78	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Rt. 01 s/d Rt.05, Kab. Kotabaru	Pamukan Selatan	Mulyodadi				
79	Bantuan Pengadaan Peralatan Kerja Mebel (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Pondok Labu, Kab. Kotabaru	Pamukan Selatan	Pondok Labu				
80	Rehabilitasi Sedang/Berat Toko/Kios/Los Pasar (syarat yang diperlukan: -rehab atap, -peninggian lantai)	RT.01, Kab. Kotabaru	Pamukan Selatan	Sekandis				
81	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	Jalan Karya Pembangunan RT 010, Kab. Kotabaru	Pamukan Selatan	Sukadana				
82	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.03 Desa Balaimea, Kab. Kotabaru	Pamukan Utara	Balaimea				
83	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.01 Desa Pamukan Indah, Kab. Kotabaru	Pamukan Utara	Pamukan Indah				
84	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.03 Desa Tamiang, Kab. Kotabaru	Pamukan Utara	Tamiang				
85	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.03 Desa Wonorejo, Kab. Kotabaru	Pamukan Utara	Wonorejo				
86	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	DESA GEMURUH RT.002, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Gemuruh				
87	Bantuan Pengadaan Kulkas Freezer (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	DESA GEMURUH RT.001, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Gemuruh				
88	Bantuan Pengadaan Kulkas Freezer (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan (Kelompok Anggrek), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
89	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
90	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan (Karang Taruna Karya Bahari), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
91	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan (Kelompok Usaha Ibu Bahagia), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
92	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan (Kelompok Tukang Berkat Bersama), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
93	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan (Kelompok Tukang Usaha Mandiri), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
94	Bantuan Pengadaan Kulkas Freezer (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan RT. 05 (Kelompok IRT Rukun Sejahtera), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
95	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan RT. 01 (Kelompok Usaha Dapur Mama), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
96	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Lontar Timur, RT 01 s/d 06, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Timur				
97	Bantuan Pengadaan Kulkas Freezer (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Lontar Timur, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Timur				
98	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	JL. A. Yani RT.001 Dusun I Desa Lontar Utara Kecamatan Pulaulaut Barat, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Utara				
99	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sebanti				
100	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sebanti				
101	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -	RT.02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sebanti				

	proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)							
102	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sebanti				
103	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sebanti				
104	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sebanti				
105	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Semaras RT.005/RW.003, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Semaras				
106	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sepagar, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sepagar				
107	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 05, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sumber Sari				
108	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sumbersari Rt 05, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sumber Sari				
109	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.04, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Tapian Balai				
110	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.01,02,03 dan 07 Kerayaan Utara, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Kerayaan Utara				
111	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.01,02,03,05,06 dan 07 Kerayaan Utara, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Kerayaan Utara				
112	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemeras Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 02,04,05 dan 07, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Kerayaan Utara				
113	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	PULAU KERASIAN, RT.03, RT.05, RT.06, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerasian				
114	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	PULAU KERASIAN RT.05, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerasian				
115	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	PULAU KERASIAN, RT.02, RT.03, RT.04, RT.05, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerasian				
116	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Pulau Kerumputan, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerumputan				
117	Bantuan Peralatan Pengolahan Aneka Kacang dan Kue Kering	RT 01,02,03, dan 04, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan				
118	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 01,02,03 DAN 04, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan				
119	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan				
120	Bantuan Pengadaan Peralatan Membuat Mahar dan Hias Seseheraan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 01 ,02,03,04, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan				
121	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: -pemasangan keramik,-rehab kios, -pengcatan)	Desa Tanjung Lalak Utara RT 05 Dusun 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara				
122	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tanjung Lalak Utara RT 01 Dusun 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara				
123	Pengadaan Peralatan Percetakan	Desa tanjung Lalak Utara RT 04 Dusun 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara				
124	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa tanjung Lalak Utara RT 04 Dusun 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara				
125	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengolahan Arang	Desa Tanjung Lalak Utara RT 01 Dusun 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara				
126	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Kemuning RT 03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Teluk Kemuning				

127	Bantuan Pengadaan Peralatan Industri Kerajinan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Kemuning RT 04, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Teluk Kemuning				
128	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Kemuning RT 05, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Teluk Kemuning				
129	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sungai Bahim, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Sungai Bahim				
130	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Madarammang RT. 007 RW. 004, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka				
131	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Madarammang RT. 007 RW. 004, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka				
132	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemeras Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Madarammang RT. 006 RW. 003, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka				
133	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemeras Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Madarammang RT. 006 RW. 003, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka				
134	Pengadaan Peralatan Percetakan	Jl. H. Kanda RT. 002 RW. 001, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka				
135	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tanjung Serudung Rt.01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Tanjung Serudung				
136	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01 Desa Teluk Sirih, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Teluk Sirih				
137	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemeras Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01 Desa Teluk Sirih, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Teluk Sirih				
138	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Bandar Raya, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bandar Raya				
139	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bangun Rejo				
140	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bangun Rejo				
141	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bangun Rejo				
142	Pengadaan Peralatan Percetakan	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bangun Rejo				
143	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Gosong Panjang, RT 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Gosong Panjang				
144	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Gosong Panjang, RT 03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Gosong Panjang				
145	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Gosong Panjang RT 03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Gosong Panjang				
146	Bantuan Pengadaan Peralatan Kerja Mebel (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Gosong Panjang, Rt 03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Gosong Panjang				
147	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Kampung Baru, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Kampung Baru				
148	Bantuan Pengadaan Kulkas Freezer (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jalan Mercusuar RT/RW. 03/02 Desa Tanjung Kunyit Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Kunyit				
149	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tanjung Sungkai Rt 03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Sungkai				
150	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tanjung Sungkai Rt 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Sungkai				
151	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang	RT 07, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung	Tanjung Tengah				

	diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)		Selayar					
152	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemeras Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Tengah				
153	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tata Mekar, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tata Mekar				
154	Bantuan Pengadaan Mesin Sablon Listrik (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Tamiang RT. 06, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Teluk Tamiyang				
155	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Tamiang Rt 05, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Teluk Tamiyang				
156	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Raya Tanjung Serdang RT.004 KM.32.5, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tengah	Selaru				
157	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dusun II ( RT.09) Desa Sungaipasir, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tengah	Sungaipasir				
158	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: -pemasangan keramik,-rehab kios, -pengecatan)	Batu Tunau RT.01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Batu Tunau				
159	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Batu Tunau RT.1-2-3, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Batu Tunau				
160	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa karang Sari Indah RT 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Karangsari Indah				
161	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa karang Sari Indah RT 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Karangsari Indah				
162	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jalan raya lintas timur, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Kulipak				
163	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	Desa Langkang Baru RT.002, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Langkang Baru				
164	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Langkang Baru RT.002, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Langkang Baru				
165	Bantuan Pengadaan Peralatan Industri Kerajinan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Gosong, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Teluk Gosong				
166	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Gosong, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Teluk Gosong				
167	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Gosong Kec. Pulaulaut Timur, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Teluk Gosong				
168	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.004, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Teluk Mesjid				
169	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.03-04, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Teluk Mesjid				
170	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Putri Jaleha RT. 01 RW. 01 Kelurahan Baharu Selatan, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Baharu Selatan				
171	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Putri Jaleha Gg. Irama RT. 02 RW. 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Baharu Selatan				
172	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. SMP 5 RT. 03 RW. 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Baharu Selatan				
173	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Putri Jaleha RT. 10 RW. 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Baharu Selatan				
174	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Putri Jaleha Gg. Aris Munandar RT. 11 RW. 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Baharu Selatan				
175	Rehabilitasi Sedang/Berat Toko/Kios/Los Pasar (syarat yang diperlukan: -rehab atap, -peninggian lantai)	Jl. Suryaganggawansa RT,09, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Baharu Utara				
176	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jalan gunung sari RT.004/002, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Gunung Sari				
177	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposai, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jalan gunung sari RT. 001/001, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Gunung Sari				

178	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jalan gunung sari RT. 004/002, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Gunung Sari				
179	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Bendungan RT.04 Desa Megasari, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Megasari				
180	Bantuan Pengadaan Alat Pengering Kripik / Kerupuk / Amplang (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jl.Titian Beringin Rt.10.Rw.03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Rampa				
181	Bantuan Pengadaan Alat Pengering Kripik / Kerupuk / Amplang (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	desa rampa Rt.09.Rw.03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Rampa				
182	Bantuan Pengadaan Alat Pengering Kripik / Kerupuk / Amplang (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jl.citra Rt.01.Rw.01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Rampa				
183	Bantuan Pengadaan Alat Pengering Kripik / Kerupuk / Amplang (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jl titian beringin rt.03/01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Rampa				
184	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	SARANG TIUNG, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Sarang Tiung				
185	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	KELOMPOK GAIRA A.4 RT. 011, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Sarang Tiung				
186	Bantuan Pengadaan Mesin Sablon Listrik (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Pangeran Hidayat RT.04/RW.01 Desa Sebatung, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Sebatung				
187	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Suryagandamana RT.05/RW.02 Desa Sebatung, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Sebatung				
188	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jalan berangas rt.01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Sigam				
189	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.002, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Tirawan				
190	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tirawan, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Tirawan				
191	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tirawan, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Tirawan				
192	Bantuan Pengadaan Alat Pengering Kripik / Kerupuk / Amplang (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tirawan, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Tirawan				
193	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Belambus, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Balambus				
194	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Belambus, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Balambus				
195	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Belambus, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Balambus				
196	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Belambus, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Balambus				
197	Bantuan Pengadaan Peralatan Membuat Mahar dan Hias Seseheran (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Belambus, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Balambus				
198	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengolahan Gula Aren	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Kanibungan				
199	Bantuan Peralatan Pengolahan Aneka Kacang dan Kue Kering	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Kanibungan				
200	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Kanibungan				
201	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengolahan Arang	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Kanibungan				
202	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Kanibungan				
203	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 02, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Kanibungan				
204	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Mandin, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Mandin				
205	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Mandin, Kab. Kotabaru	Pulausbuku	Mandin				

	diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)							
206	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Rampa, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Rampa				
207	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Rampa, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Rampa				
208	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: - pemasangan keramik, -rehab kios, -pengecatan)	Desa Rampa, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Rampa				
209	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.01 - RT.05, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Serakaman				
210	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, - nama kelompok, -alamat, no. hp)	Sungai Bali, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Sungai Bali				
211	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Sungai, Kab. Kotabaru	Pulausembilan	Teluk Sungai				
212	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.002 RW.001, Kab. Kotabaru	Sampanahan	Gunung Batu Besar				
213	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.002 RW.001, Kab. Kotabaru	Sampanahan	Gunung Batu Besar				
214	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 02, Kab. Kotabaru	Sampanahan	Rampa Manunggul				
215	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sampanahan, Kab. Kotabaru	Sampanahan	Sampanahan				
216	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: - pemasangan keramik, -rehab kios, -pengecatan)	Desa Sukamaju RT 12 RW 002, Kab. Kotabaru	Sampanahan	Suka Maju				
217	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sungai Betung, Kab. Kotabaru	Sampanahan	Sungai Betung				
218	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: - proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sungai Betung, Kab. Kotabaru	Sampanahan	Sungai Betung				
219	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Laguna Mandiri 1 KM.13 RT.003 RW.001, Kab. Kotabaru	Sungaidurian	Rantau Jaya				
220	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl Laguna Mandiri 1 KM.13 RT.003 RW.001, Kab. Kotabaru	Sungaidurian	Rantau Jaya				
221	Pembangunan Kios Pasar (syarat yang diperlukan: min 5 bh kios uk.20x15m)	Jl. Dahlia, RT.009 RW.003 Desa Terombongsari, Kab. Kotabaru	Sungaidurian	Terobong Sari				
222	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Terombongsari, Kab. Kotabaru	Sungaidurian	Terobong Sari				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja adalah melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang di dukung dengan Koordinasi Vartikal yang berkualitas di Jajaran Instansi Pemberdayaan KUMKM, Industri dan Perdagangan utamanya pada tingkat propinsi maupun Pusat sehingga pengintegrasian program kegiatan Pemerintah tercapai dengan baik.

Beberapa Program Kegiatan yang sinergitas dengan kebijakan Pembangunan Nasional antara lain :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dalam upaya meningkatkan daya saing produk industri dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.
2. Meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Lokal yang berkelanjutan, terutama pada industri pengolahan, diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian dan SDM yang unggul.
3. Arah dan kebijakan nasional di sector perdagangan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2015 serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya peningkatan pertumbuhan ekspor non migas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sesuai.
4. Arah kebijakan dan strategi Kementrian Perdagangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 telah menerapkan misi pembangunan Nasional yang terkait langsung sector perdagangan. Antara lain, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Arah kebijakan pembangunan perdagangan nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2010 – 2014. Arah ini

merupakan pedoman dalam menyusun langkah langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Arah kebijakan Perdagangan dapat dijabarkan menjadi 5 (lima) pokok pikiran, yaitu :

1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan forum internasional dengan menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam nasional.
2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah.
4. Memantapkan nilai nilai baku yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri Arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri adalah peningkatan pemerataan Perdagangan Nasional yang menjadikan arus barang dan jasa. Kepastian usaha dan daya saing produk domestik, strategi yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan integrasi perdagangan antar dan inter wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga.
2. Meningkatkan iklim usaha perdagangan melalui persaingan usaha yang sehat dan pengamanan perdagangan, untuk mendorong pengembangan usaha kecil menengah, waralaba termasuk pengembangan pola kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku usaha.
3. Mendorong terciptanya pengelolaan resiko harga, transparansi harga, pemanfaatan alternative pembiayaan dan efisiensi distribusi melalui peningkatan efektivitas perdagangan berjangka, system resi gudang dan pasar lelang.
4. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik melalui pemanfaatan daya kreasi bangsa.
5. Memperkuat kelembagaan perdagangan dalam negeri yang mendorong terwujudnya persaingan usaha sehat, efektivitas perlindungan konsumen serta menciptakan perdagangan berjangka, system resi gudang dan pasar lelang yang efisien

**Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan**

<b>Kebijakan Nasional Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah</b>	<b>Kebijakan Propinsi Kementerian Perindustrian</b>	<b>Kebijakan Kabupaten (RPJMD-Kotabaru)</b>	<b>Kebijakan Perangkat Daerah</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas penyuluh koperasi lapangan</li> <li>2. Pusat/gerakan kewirausahaan nasional (pemasyarakatan, promosi, advokasi, kompetisi, pendampingan, pengembangan kerja sama pusat-daerah-swasta, dan pendataan)</li> <li>3. SDM usaha mikro yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat dan pendataan)</li> <li>4. Sistem monitoring dan evaluasi terpadu, yang didukung basis data terpadu UMKM dan koperasi</li> <li>5. Sosialisasi perundang-undangan di bidang UMKM dan koperasi (Quick Wins)</li> <li>6. Usaha mikro/koperasi produsen yang difasilitasi promosi dan pemasaran produknya pada event lokal dan kepariwisataan (fasilitasi event/pameran dan pendataan) (Program Lanjutan)</li> <li>7. Wirausaha baru dan pemula yang difasilitasi permodalannya (skema bantuan, seleksi, pendampingan, pendataan)</li> <li>8. Perluasan akses ke pembiayaan, inovasi skema pembiayaan, penguatan KSP &amp; keuangan mikro, penjaminan usaha, clearing house, credit scoring.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi untuk menerapkan HaKI, standardisasi mutu dan emasan/identitas produk, praktek produksi yang baik, serta sertifikasi produk (koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, skema bantuan, pendampingan, monev dan pendataan)</li> <li>2. Memberikan fasilitasi pada industri yang menghasilkan bahan baku atau barang modal yang sederhana</li> <li>3. Terwujudnya Business Matching dan pameran antara produsen dan pengguna (sektor)</li> <li>4. Bantuan peralatan dan mesin penumbuhan industri material dasar logam.</li> <li>5. Pengembangan kompetensi inti industri daerah dan pengembangan “One Village One Product” dan kegiatan-kegiatan prioritas lainnya diimplementasikan dengan pendekatan system tersebut dalam rangka melipat gandakan nilai tambah IKM yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya lokal.</li> </ol>	<p>Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan menciptakan iklim investasi baik local, regional maupun internasional dan mendorong maju pertumbuhan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran serta Koperasi, Usaha Mikro dan Industri untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru.</li> <li>2. Menyediakan Usaha Kecil dan Industri sebagai pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK dan berdaya saing.</li> <li>3. Menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi, Usaha Kecil dan Industri yang mengolah SDA terbarukan dan menyerap tenaga kerja.</li> <li>4. Mendorong Usaha Kecil dan IKM lainnya terutama yang terkait dengan aspek penumbuhan wirausaha baru, kemitraan dan kawasan Industri.</li> <li>5. Melaksanakan pembinaan dan pengaturan di bidang Industri skala, kecil menengah dan besar yang bertumpu pada SDA lokal dan mampu mengembangkan hasil produksi yang dapat meningkatkan nilai tambah dan pengembangan Kompetensi Inti Industri.</li> <li>6. Memberikan dorongan dan fasilitasi bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan.</li> <li>7. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur dan Binaan, agar mampu melaksanakan tugasnya dan mampu menciptakan kualitas hasil produk binaan menjadi lebih bermutu, kompetitif dan meningkatkan pendapatan binaan.</li> </ol>

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan Rencana Kerja tahunan yang berupa penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang bertujuan :

1. Menetapkan dokumen pembinaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tolak ukur Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Merencanakan konsepsi pembinaan dalam upaya mengantisipasi dinamika lingkungan yang semakin kompleks dan komprehensif.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan visioner.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Program Kegiatan tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Sarasan dalam rencana kerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan program pembangunan untuk satu tahun yang telah ditentukan, yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah Indikator kinerja relevan.

**Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran dan Strategis**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efisien transparansi dalam mewujudkan koperasi yang aktif	Peningkatan kompetensi SDM dan penguatan kelembagaan Koperasi
	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Mendukung dan mengarahkan usaha-usaha berpotensi untuk dikembangkan skala dan jenis usahanya, pangsa pasar, yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat
	Meningkatnya sarana prasarana perdagangan dan pelayanan kemetrolagian	Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan
		Melakukan pengawasan peredaran distribusi Kebutuhan bahan pokok masyarakat merata dengan harga terjangkau
		Optimalisasi pendapatan pasar
Meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	Meningkatnya kualitas industri kecil pengolahan berbasis produk lokal	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
		Mendorong perkembangan sentra industri, pembentukan kawasan industri serta peningkatan mutu produk

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Kebijakan dan program merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dari menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Industri.
2. Pengembangan Potensi SDA yang dapat di olah dan memiliki nilai tambah.
3. Pemerataan terhadap pembinaan yang sinergitas dan regulasi yang mampu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan.
4. Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksinya.

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

#### **1. Urusan Wajib Koperasi dan UKM**

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil tersebut adalah :

- a. **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**
  - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
    - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
    - Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
    - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
    - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
    - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

b. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

c. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

- Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

d. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

e. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

f. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

g. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Urusan Pilihan Perindustrian

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Pilihan Perindustrian tersebut adalah :

a. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

b. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional

(SIINAS)

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

c. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

3. Urusan Pilihan Perdagangan

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Pilihan Perdagangan tersebut adalah :

a. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
  - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Penerbitan Tanda Daftar Gudang
  - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

- Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
  - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
  - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
- Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
  - Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
  - Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
- Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
  - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
- Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
  - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA- B2
  - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
- Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

**b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
  - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
  - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

c. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
  - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
  - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
  - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
  - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

d. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
  - Pameran Dagang Nasional
  - Pameran Dagang Lokal
  - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
  - Peningkatan Citra Produk Ekspor

- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
- e. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
  - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
    - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
    - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
    - Penyidikan Metrologi Legal
- f. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
  - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
    - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
    - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
    - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Dalam rangka mendukung RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 untuk meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sektor perekonomian yang merupakan prioritas daerah dengan:

1. Sub prioritas peningkatan nilai tambah dan daya saing, program yang sangat menunjang yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2. Sub Prioritas peningkatan kemandirian desa, program yang sangat menunjang yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) pada :

1. Tujuan 9 yaitu Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi. Hal tersebut dapat didukung dengan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional



**Tabel 4.1.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**

**Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Prioritas
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian		
					NON URUSAN									11.428.100.000		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*)			100%	11.061.938.532				100%	11.428.100.000	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*)			100%	414.799.800				100%	1.025.000.000	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	3	Dokumen	238.099.800			3	Dokumen	475.000.000	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	8.000.000			1	Dokumen	75.000.000	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	6.000.000			1	Dokumen	75.000.000	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	6.000.000			1	Dokumen	75.000.000	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	5.000.000			1	Dokumen	75.000.000	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kotabaru	12	Laporan	22.000.000			12	Laporan	125.000.000	
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	3	Laporan	129.700.000			1	Laporan	125.000.000	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*)			100%	7.307.523.393				100%	7.405.000.000	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotabaru	12	Orang/bulan	6.697.351.557			26	Orang/bulan	6.500.000.000	
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	12	Dokumen	28.951.914			12	Dokumen	650.000.000	
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotabaru	12	Dokumen	576.720.000			12	Dokumen	220.000.000	
2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	0			1	Dokumen	12.000.000	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	1	Laporan	3.499.948			1	Laporan	7.000.000	
2	17	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	0			1	Dokumen	7.000.000	

2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kotabaru	4	Laporan	0		4	Laporan	7.000.000	
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	999.974		1	Dokumen	2.000.000	
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*)</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	
2	17	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	1	Dokumen			1	Dokumen		
2	17	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	1	Dokumen			1	Dokumen		
2	17	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	1	Laporan			1	Laporan		
2	17	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	1	Laporan			1	Laporan		
2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	1	Laporan			1	Laporan		
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	1	Laporan			1	Laporan		
2	17	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	1	Dokumen			1	Dokumen		
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah*)</b>			<b>100%</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	
2	17	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1	Dokumen			1	Dokumen		
2	17	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		1	Dokumen			1	Dokumen		
2	17	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		1	Laporan			1	Laporan		
2	17	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		1	Dokumen			1	Dokumen		
2	17	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		1	Laporan			1	Laporan		
2	17	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		1	Dokumen			1	Dokumen		
2	17	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1	Dokumen			1	Dokumen		
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*)</b>			<b>100%</b>	<b>49.380.000</b>			<b>100%</b>	<b>260.000.000</b>	
2	17	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kotabaru	1	Unit			1	Unit		
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotabaru	3	Paket			3	Paket	260.000.000	
2	17	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	1	Dokumen			1	Dokumen		

2	17	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	1	Dokumen				1	Dokumen		
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kotabaru	1	Dokumen				1	Dokumen		
2	17	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Kab. Kotabaru		Orang					Orang		
2	17	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Kotabaru		Laporan					Laporan		
2	17	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang pindahtugaskan	Kab. Kotabaru		Orang					Orang		
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kotabaru	1	Orang				1	Orang		
2	17	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	1	Orang				1	Orang		
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	1	Orang	49.380.000			1	Orang		
2	17	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*)</b>			<b>100%</b>	<b>906.768.752</b>			<b>100%</b>	<b>1.305.500.000</b>		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kotabaru	12	Paket	29.941.160			12	Paket	32.000.000	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kotabaru	12	Paket	24.940.869			12	Paket	27.000.000	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kotabaru	12	Paket	0			12	Paket	27.000.000	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kotabaru	12	Paket	516.779.023			12	Paket	760.000.000	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kotabaru	12	Paket	34.999.700			12	Paket	37.000.000	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kotabaru	12	Dokumen	0			12	Dokumen	7.500.000	
2	17	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kotabaru	1	Paket	0			1	Paket		
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kotabaru	14	Laporan	0			14	Laporan	45.000.000	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotabaru	75	Laporan	300.108.000			75	Laporan	370.000.000	
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kotabaru	1	Dokumen				1	Dokumen		
2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kotabaru	1	Dokumen				1	Dokumen		
2	17	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*)</b>			<b>100%</b>	<b>47.610.520</b>			<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>		
2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kotabaru		Unit					Unit		
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kotabaru	1	Unit				1	Unit		

2	17	01	2,07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kab. Kotabaru		Unit				Unit		
2	17	01	2,07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Kab. Kotabaru		Unit				Unit		
2	17	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kotabaru	4	Unit	0		4	Unit	40.000.000	
2	17	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kotabaru	4	Unit	47.610.520		4	Unit	40.000.000	
2	17	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Kotabaru	1	Unit			1	Unit		
2	17	01	2,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Kotabaru		Unit				Unit		
2	17	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kotabaru	1	Unit			1	Unit		
2	17	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kotabaru	1	Unit			1	Unit		
2	17	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kotabaru	1	Unit			1	Unit		
2	17	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*)</b>			<b>100%</b>	<b>1.985.800.000</b>			<b>100%</b>	<b>702.600.000</b>	
2	17	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	12	Laporan	5.000.000		12	Laporan	16.000.000	
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kotabaru	4	Laporan	403.700.000		4	Laporan	550.000.000	
2	17	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kotabaru	1	Laporan			1	Laporan		
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kotabaru	60	Laporan	1.577.100.000		60	Laporan	136.600.000	
2	17	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *)</b>			<b>100%</b>	<b>350.056.067</b>			<b>100%</b>	<b>650.000.000</b>	
2	17	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kotabaru	12	Unit			12	Unit	120.000.000	
2	17	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kotabaru	4	Unit	154.076.067		4	Unit	80.000.000	
2	17	01	2,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Kotabaru		Unit				Unit		
2	17	01	2,09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kab. Kotabaru		Unit				Unit		
2	17	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Kotabaru	1	Unit			1	Unit		
2	17	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kotabaru	40	Unit	80.280.000		40	Unit	75.000.000	

2	17	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kotabaru	1	Unit				1	Unit		
2	17	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Kotabaru	1	Unit				1	Unit		
2	17	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kotabaru	1	Unit	115.700.000			1	Unit	275.000.000	
2	17	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kotabaru	1	Unit				1	Unit	50.000.000	
2	17	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kotabaru	1	Unit				1	Unit	50.000.000	
2	17	01	2,09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kab. Kotabaru		Ha					Ha		
2	17				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>					3.789.059.558					2.813.000.000	
2	17	02			<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Fasilitas Koperasi yang memiliki Perizinan Usaha</b>			46,67%	-				66,67%	60.000.000	
2	17	02	2,01		<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			45,00%	-				65,00%	30.000.000	
2	17	02	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	4	Unit Usaha				4	Unit Usaha	30.000.000	
2	17	02	2,02		<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>			50,00%	-				70,00%	30.000.000	
2	17	02	2,02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	2	Unit Usaha				5	Unit Usaha	30.000.000	
2	17	03			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT</b>			39,13%	290.000.000				41,67%	300.000.000	
2	17	03	2,01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>			39,13%	290.000.000				41,67%	300.000.000	
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	35	Unit Usaha	130.000.000			35	Unit Usaha	135.000.000	
2	17	03	2,01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	4	Unit Usaha	160.000.000			4	Unit Usaha	165.000.000	
2	17	04			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Penilaian Kesehatan</b>			60,00%					80,00%		

					KSP/USP KOPERASI	KSP/USP Koperasi				-						100.000.000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			60,00%	-					80,00%	100.000.000	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	10	Unit Usaha	0			10	Unit Usaha	50.000.000		
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	10	Unit Usaha	0			10	Unit Usaha	50.000.000		
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian			47,62%	100.000.000				47,62%	330.000.000		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian			47,62%	100.000.000				47,62%	330.000.000		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kotabaru	60	Orang	100.000.000			60	Orang	330.000.000		
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			57,14%	90.000.000				57,14%	130.000.000		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah			57,14%	90.000.000				57,14%	130.000.000		
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	15	Unit Usaha	90.000.000			15	Unit Usaha	130.000.000		
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil			60,00%	2.898.999.620				80,00%	1.170.000.000		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			60,00%	2.898.999.620				80,00%	1.170.000.000		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kab. Kotabaru	160	Orang	2.738.999.858			160	Orang	600.000.000		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	10	Unit Usaha	-			10	Unit Usaha	120.000.000		
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Kotabaru	60	Unit Usaha	159.999.762			60	Unit Usaha	150.000.000		
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	60	Unit Usaha	-			60	Unit Usaha	150.000.000		
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	30	Orang	-			30	Orang	150.000.000		
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan			60,00%	410.059.938				80,00%	723.000.000		

2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha			60,00%	410.059.938				80,00%	723.000.000	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kotabaru	128	Unit Usaha	410.059.938			128	Unit Usaha	723.000.000	
3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					3.204.095.558					19.450.000.000	
3	30	02			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			88,89%	200.000.000				94,44%	1.450.000.000	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Rekomendasi pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan			100%	-				100%	160.000.000	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kotabaru	8	Dokumen	-			8	Dokumen	160.000.000	
3	30	02	2.02		<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Persentase Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>			85,00%	100.000.000				88,00%	160.000.000	
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Kotabaru	8	Dokumen	100.000.000			8	Dokumen	160.000.000	
3	30	02	2.03		<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	<b>Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>			100%	-				100%	240.000.000	
3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kotabaru	8	Dokumen	-			8	Dokumen	120.000.000	
3	30	02	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Kotabaru	5	Dokumen	-			5	Dokumen	120.000.000	
3	30	02	2.04		<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri</b>	<b>Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri</b>			100%	-				100%	290.000.000	
3	30	02	2.04	01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Kab. Kotabaru	8	Dokumen	-			8	Dokumen	170.000.000	
3	30	02	2.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kab. Kotabaru	8	Dokumen	-			8	Dokumen	120.000.000	
3	30	02	2.05		<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>	<b>Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>			40,00%	-				60,00%	120.000.000	

3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kotabaru	10	Dokumen	-			10	Dokumen	120.000.000	
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			40,00%	-				60,00%	360.000.000	
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kotabaru	8	Laporan	-			8	Laporan	120.000.000	
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Kotabaru	8	Dokumen	-			8	Dokumen	120.000.000	
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Kotabaru	8	Laporan	-			8	Laporan	120.000.000	
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			88,89%	100.000.000				94,44%	120.000.000	
3	30	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kab. Kotabaru	8	Dokumen	100.000.000			8	Dokumen	120.000.000	
3	30	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan</b>			53,85%	2.509.097.062				61,54%	15.830.000.000	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			27,69%	2.386.098.104				32,31%	15.620.000.000	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	4	Unit	2.176.099.736			4	Unit	15.500.000.000	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	48	Unit	209.998.368			Unit	Kali	120.000.000	
3	30	03	2.02		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			32,31%	122.998.958				36,92%	210.000.000	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	50	Dokumen	122.998.958			50	Dokumen	90.000.000	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	30	Dokumen				30	Dokumen	120.000.000	
3	30	04			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</b>			100%	119.999.567				100%	830.000.000	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			100%	-				100%	310.000.000	

3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	12	Laporan	0			12	Laporan	120.000.000	
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	12	Laporan	0			12	Laporan	70.000.000	
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	24	Laporan	0			24	Laporan	120.000.000	
3	30	04	2.02		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>			100%	119.999.567			100%		310.000.000	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	96	Laporan	-			96	Laporan	120.000.000	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kotabaru	96	Laporan	119.999.567			96	Laporan	80.000.000	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	4	Laporan	-			4	Laporan	110.000.000	
3	30	04	2.03		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			36,36%	-			54,55%		210.000.000	
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kotabaru	6	Dokumen	-			6	Dokumen	70.000.000	
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kotabaru	6	Laporan	-			6	Laporan	70.000.000	
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Kotabaru	6	Laporan	-			6	Laporan	70.000.000	
3	30	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan</b>			100%	-			100%		720.000.000	
3	30	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			100%	-			100%		720.000.000	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kab. Kotabaru	48	Pelaku Usaha	-			48	Pelaku Usaha	170.000.000	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Kotabaru	2	Pelaku Usaha	-			2	Pelaku Usaha	220.000.000	
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Kotabaru	2	Pelaku Usaha	-			2	Pelaku Usaha	120.000.000	
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Kotabaru	40	Pelaku Usaha	-			40	Pelaku Usaha	70.000.000	

3	30	05	2,01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Kotabaru	40	Produk	-			40	Produk	70.000.000	
3	30	05	2,01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kab. Kotabaru	40	Pelaku Usaha	-			40	Pelaku Usaha	70.000.000	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar			60%	324.999.847				80%	470.000.000	
3	30	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			60%	324.999.847				80%	470.000.000	
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Kotabaru	650	Unit	149.999.860			650	Unit	160.000.000	
3	30	06	2,01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Kotabaru	30	orang	84.999.987			30	orang	130.000.000	
3	30	06	2,01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kotabaru	300	Unit	90.000.000			300	Unit	180.000.000	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri			100%	49.999.082				100%	150.000.000	
3	30	07	2,01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			100%	49.999.082				100%	150.000.000	
3	30	07	2,01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	2	Kali	0			2	Kali	50.000.000	
3	30	07	2,01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	2	Kali	0			2	Kali	50.000.000	
3	30	07	2,01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Kotabaru	2	Kali	49.999.082			2	Kali	50.000.000	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.223.000.000,00					2.270.000.000,00	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM			60%	2.103.000.000,00				80%	1.915.000.000,00	
3	31	02	2,01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase hasil penerapan RPIK yang ditetapkan menjadi perda			60%	2.103.000.000,00				80%	1.915.000.000,00	
3	31	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	0			1	Dokumen	150.000.000	
3	31	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	0			1	Dokumen	25.000.000	
3	31	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	150.000.000			1	Dokumen	400.000.000	
3	31	02	2,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	1.533.000.000			1	Dokumen	975.000.000	
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	420.000.000			1	Dokumen	300.000.000	
3	31	02	2,01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	0			1	Dokumen	65.000.000	

3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait			4,39%	20.000.000				4,39%	65.000.000		
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)			4,39%	20.000.000				4,39%	65.000.000		
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	-			1	Dokumen	30.000.000		
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	20.000.000			1	Dokumen	35.000.000		
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini			84,00%	100.000.000				92,00%	290.000.000		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas			84,00%	100.000.000				92,00%	290.000.000		
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Kotabaru	1	Dokumen	100.000.000			1	Dokumen	250.000.000		
3	31	04	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Kotabaru	2	Dokumen	0			2	Dokumen	20.000.000		
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Kotabaru	2	Dokumen	0			2	Dokumen	20.000.000		
																20.278.093.648	35.961.100.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2023, merupakan Kometmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam pelaksanaan telah ditetapkan Program pembangunan terhadap pencapaian sasaran anggaran kegiatan dalam periode tahunan. Dalam pencapaian sasaran tersebut diperlukan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan dalam upaya pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

#### **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru selama Tahun 2023 dan sebagai pengukur rencana capaian kerja organisasi yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan Pembangunan Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil secara kuantif menunjukan peningkatan yang berarti, namun secara kualitas masih belum sebagaimana yang diharapkan. Karena itu upaya pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang disadari sangat besar menyerap tenaga kerja ini akan terus ditingkatkan baik volume dan frekuensinya, sehingga keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang merupakan gerakan ekonomi kerakyatan ini lebih mampu berperan serta mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat luas.

Perkembangan Industri Pengolahan di daerah terutama untuk Industri besar menunjukkan perkembangan yang meningkat, sedangkan untuk Industri kecil rumah tangga pada satu sisi terjadi peningkatan tetapi pada sisi lain masih menghadapi permasalahan internal seperti aspek manajemen, keterampilan, permodalan dan pemasaran. Untuk itu upaya pengembangannya akan terus diupayakan baik melalui penciptaan hubungan yang sinergik dengan mitra usaha, pembinaan dan pengembangan keterampilan dan manajemen usaha yang terus menerus serta dukungan kebijakan penciptaan iklim berusaha yang sehat dan kondusif.

Pengaplikasian berbagai persoalan teknis dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor perdagangan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (Stakeholder) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada akhirnya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembet ke bawah sehingga keberpihakan masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

## **5.2 Rencana Tindak Lanjut**

1. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil mempunyai peranan penting dan menempati posisi strategi dalam upaya menciptakan perubahan struktur perekonomian masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap Koperasi terutama untuk meningkatkan Koperasi aktif melalui Program pembinaan Koperasi.
2. Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Kotabaru terus mengalami peningkatan, sehingga diperlukan fasilitasi dari Pemerintah Daerah untuk membuka jaringan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil melalui kegiatan promosi dan pameran baik tingkat Provinsi maupun Nasional demikian juga untuk peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan fasilitasi bantuan peralatan produk.
3. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Industri akan tetap dilanjutkan dan dipadukan dengan pembangunan berdimensi kewilayahan sehingga lebih koordinatif, partisipatif dan business oriented. Implementasi program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta pengembangan Industri harus didukung oleh kapasitas birokrasi dan peran serta lembaga-lembaga masyarakat.

4. Penguatan daya saing hasil produksi harus ditopang motivasi, kreatifitas, keahlian teknis dan keterampilan, olah teknologi dan inovasi produk.
5. Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (Stoke Holder) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada akhirnya akan mampu menciptakan kebijakan tentang bidang perdagangan yang dampaknya merembet ke bawah sehingga keberpihakan masyarakat kecil benar-benar dikedepankan

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ini disusun sebagai pedoman dan dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang sudah di tetapkan.

Kotabaru, Juni 2022

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru



**KHAIRIL FAJRI, S.STP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730503 199403 1 009